

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dengan baik.

LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan wujud tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Banjarmasin, 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751102 199412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan 2025-2029. LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis yang disajikan pada tabel berikut :

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2021-2025

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan	99.85%	Baik
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	110 %	Istimewa
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %	Istimewa
4	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	110 %	Istimewa
Rata-Rata Capaian		105 %	Istimewa

Dari Renstra 2021-2026 Dari 4 sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 didukung oleh 6 indikator, terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 2 indikator kinerja utama dengan kategori Baik. Pencapaian eselon di Dinas Perhubungan Renstra 2021-2026 memiliki 94 sasaran strategis tahun 2025 didukung oleh 119 indikator, terdapat 108 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 6 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, 3 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan, 1 indikator kinerja utama dengan kategori Kurang dan 1 indikator kinerja utama dengan kategori Sangat Kurang.

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	103%	Istimewa
2	Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	97.5 %	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	94,4 %	Baik
Rata-Rata Capaian		98.3 %	Baik

Renstra 2025-2029 Dari 3 sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 didukung oleh 8 indikator, terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 3 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, dan 1 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan. Pencapaian eselon di Dinas Perhubungan Renstra 2025-2029 memiliki 94 sasaran strategis tahun 2025 didukung oleh 62 indikator, terdapat 50 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 9 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, 1 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan dan 2 indikator kinerja utama dengan kategori Sangat Kurang.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 161.368.758.666,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 149.065.839.370,- atau 92,38 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.302.919.296,- atau 7,62%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.475.571.888,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.054.553.211,- atau 90,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 421.018.677,- atau 9,41%.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Memaksimalkan pelaksanaan tercapainya proyek strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana Terminal Tipe B
4. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan perlunya dukungan instansi lain (Kementerian Perhubungan, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi, Kemenpan RB, Dishub Kab/Kota, BPTD Wil. XV Prov. Kalsel).
5. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk mewujudkan program visi dan misi gubernur;
6. Peningkatan komitmen unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
7. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.
9. Mengembangkan inovasi yang mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi.
10. Memenuhi ketersediaan data dan informasi sektor perhubungan
11. Meningkatkan efektivitas kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	40
A.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	40
1. Sasaran RPJMD	41
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	54
3. Eselon III (Sekretaris).....	76
1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset).....	92
2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	113
4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)	133

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran)	144
2) Eselon IV (Kepala Seksi Prasarana Pelayaran)	150
3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa)	155
5. Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)	164
1) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang).....	178
2) Eselon IV (Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan).....	187
3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal)	196
6. Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)	212
1) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas)	225
2) Eselon IV (Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan).....	230
3) Eselon IV (Kepala Seksi Manejemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan).....	239
7. Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan)	249
1) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan).....	259
2) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal UPTD Terminal Provinsi Kalimantan Selatan)	265
3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B)	270
A.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	288
B. Akuntabilitas Keuangan	291
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025	291
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.	307
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	309
BAB IV PENUTUP	317
A. Simpulan.....	317

B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	318

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026	11
Tabel 2. 2	Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029	12
Tabel 2. 3	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	12
Tabel 2. 4	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	15
Tabel 2. 5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	17
Tabel 2. 6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	32
Tabel 3. 1	Rentang Capaian dan Katagori Capaian.....	40
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 RPJMD 2021-2026	41
Tabel 3. 3	Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas RPJMD Tahun 2021-2026.....	41
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 RPJMD 2025-2029	42
Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi RPJMD 2025-2029	43
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan	43
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2025	43
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's Tahun 2025	44
Tabel 3. 9	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	50
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	54
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama Rencana Strategis Tahun 2021-2026	57
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	58
Tabel 3. 13	Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi RPJMD 2025-2029	60
Tabel 3. 14	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan	60
Tabel 3. 15	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2025.....	61
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's Tahun 2025	61
Tabel 3. 17	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	71

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	76
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	78
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	79
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	81
Tabel 3. 22 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	88
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	93
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama ...	96
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	99
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama Rencana Strategis Tahun 2025-2029	100
Tabel 3. 27 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	107
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	113
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	117
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	119
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	121
Tabel 3. 32 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	128
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	133
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	136
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	137
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	138
Tabel 3. 37 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	142
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	144
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	145
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	146
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	147
Tabel 3. 42 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	149
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	150
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	151
Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	152

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	153
Tabel 3. 47 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	155
Tabel 3. 48 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	156
Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	157
Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	158
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	160
Tabel 3. 52 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	163
Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	165
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	166
Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	167
Tabel 3. 56 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	168
Tabel 3. 57 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	173
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	178
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	180
Tabel 3. 60 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	181
Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	182
Tabel 3. 62 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	185
Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	187
Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	188
Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	189
Tabel 3. 66 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	190
Tabel 3. 67 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	194
Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	196
Tabel 3. 69 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	200
Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	203
Tabel 3. 71 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama ..	205
Tabel 3. 72 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	210
Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	213
Tabel 3. 74 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	214
Tabel 3. 75 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	216
Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama ..	216
Tabel 3. 77 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	222

Tabel 3. 78 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	225
Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	226
Tabel 3. 80 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	226
Tabel 3. 81 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	227
Tabel 3. 82 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	229
Tabel 3. 83 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	230
Tabel 3. 84 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	232
Tabel 3. 85 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	233
Tabel 3. 86 Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	234
Tabel 3. 87 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	238
Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	240
Tabel 3. 89 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	241
Tabel 3. 90 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	242
Tabel 3. 91 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama ..	243
Tabel 3. 92 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	247
Tabel 3. 93 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	249
Tabel 3. 94 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	250
Tabel 3. 95 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	251
Tabel 3. 96 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama ..	253
Tabel 3. 97 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	258
Tabel 3. 98 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	260
Tabel 3. 99 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama .	260
Tabel 3. 100 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	261
Tabel 3. 101 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	262
Tabel 3. 102 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	264
Tabel 3. 103 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	265
Tabel 3. 104 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	266
Tabel 3. 105 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	266
Tabel 3. 106 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	267
Tabel 3. 107 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	269
Tabel 3. 108 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	270

Tabel 3. 109 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	274
Tabel 3. 110 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025	275
Tabel 3. 111 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	278
Tabel 3. 112 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	286
Tabel 3. 113 Analisis Efisiensi	288
Tabel 3. 114 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 Dinas Perhubungan	291
Tabel 3. 115 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan	304
Tabel 3. 116 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah	307
Tabel 3. 117 Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	308
Tabel 3. 118 Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B	309
Tabel 3. 119 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	310
Tabel 3. 120 Belanja Langsung Dinas Perhubungan	315
Tabel 3. 121 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 pada UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan	315
Tabel 3. 122 Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B	316

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar 1. 2 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	5
Gambar 1. 3 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.....	7
Gambar 1. 5 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	8
Gambar 1. 6 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Jenis Kelamin	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Dasar hukum penyusunan meliputi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga dapat digunakan sebagai sarana pengukuran kinerja yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan atau sasaran yang telah ditentukan. Setelah ukuran keberhasilan tersebut didapatkan, maka informasi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang.

Komponen kinerja yang disampaikan pada LAKIP ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Dengan demikian, LAKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD 2021-2026 dan 2025-2029 dan Renstra 2021-2026 dan 2025-2029 .

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

a. Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 012 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Pada Dinas Perhubungan.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pepaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;

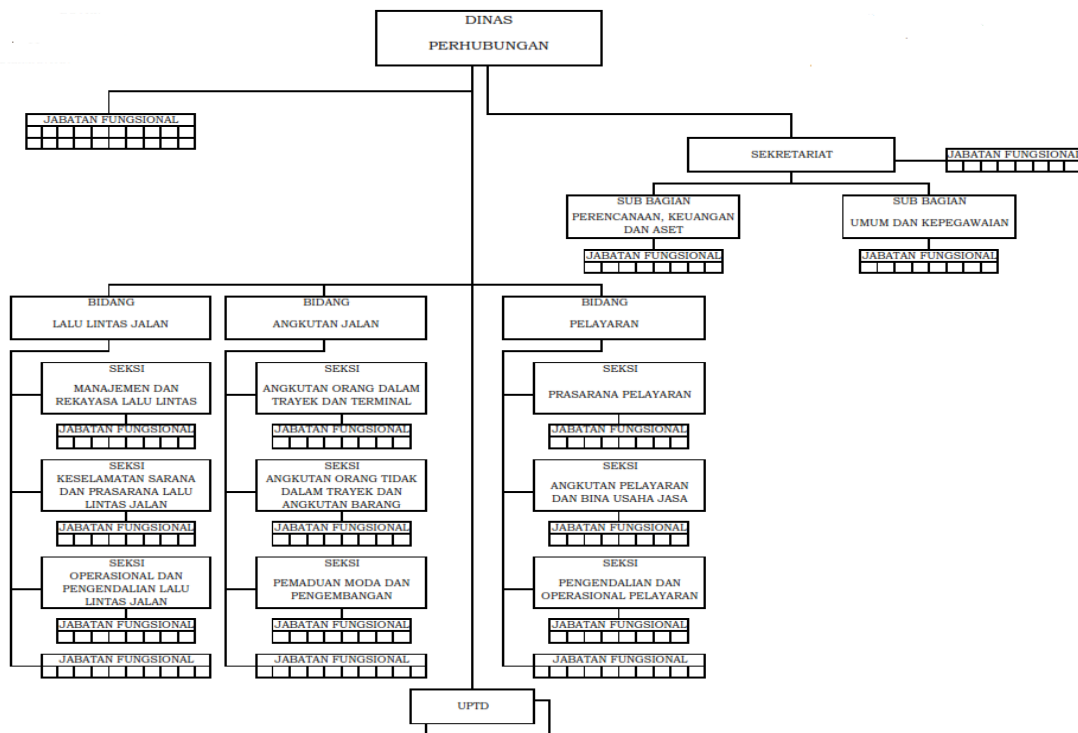
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- c. Bidang Angkutan Jalan;
- d. Bidang Pelayaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.1. berikut.



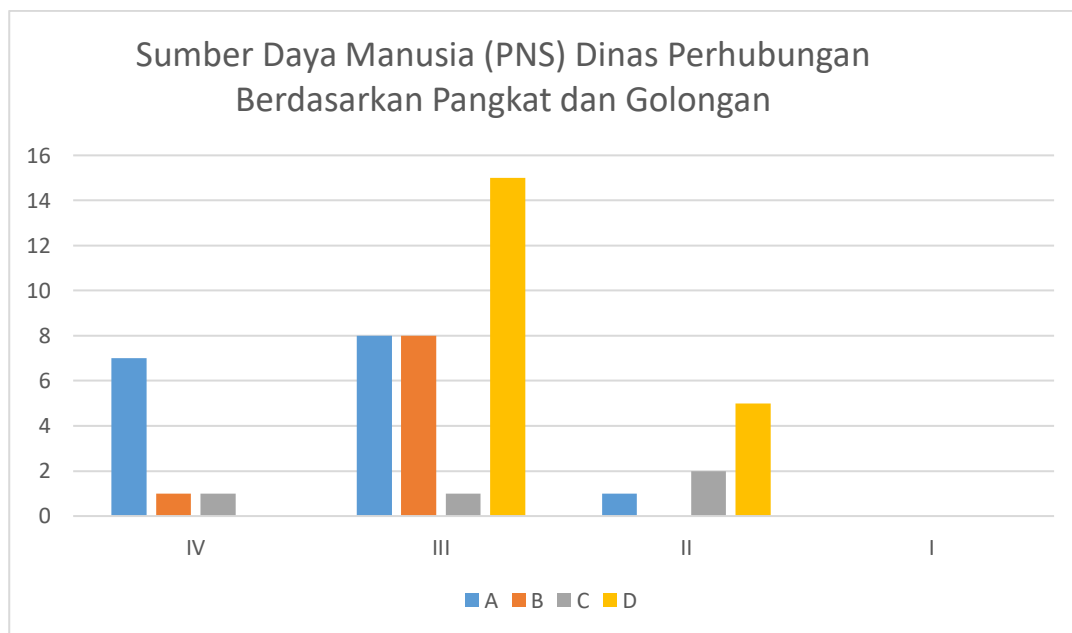
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 disampaikan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

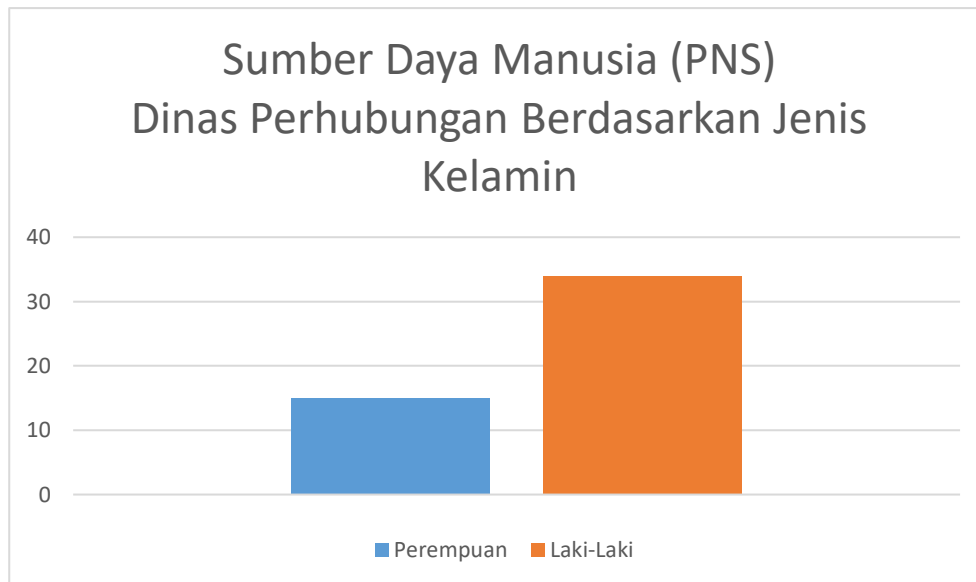
- perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
- pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pepaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 49 orang dengan rincian 1 (satu) (Kepala Dinas), 4 (empat) Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 11 (sebelas) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 33 (tiga puluh tiga) Staf.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 2
Sumber Daya Manusia (PNS)
Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Gambar 1. 3

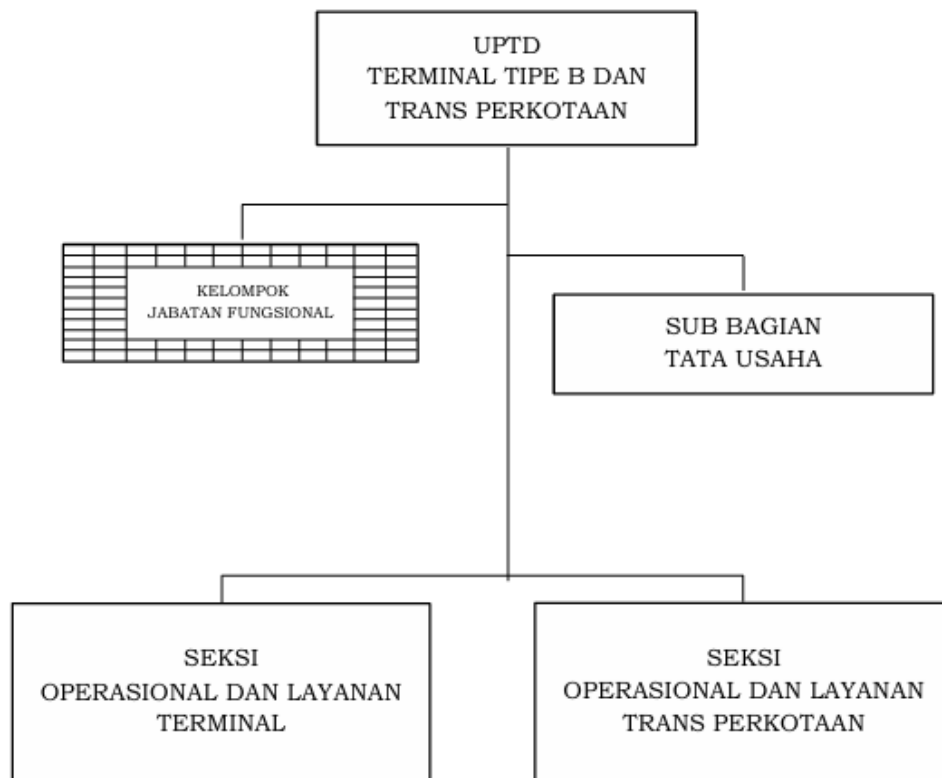
Sumber Daya Manusia (PNS)

Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Pada Dinas Perhubungan Tanggal 31 Juli 2024. Adapun susunan organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Operasional Dan Layanan Terminal;
- c. Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.4. berikut.



Gambar 1. 4

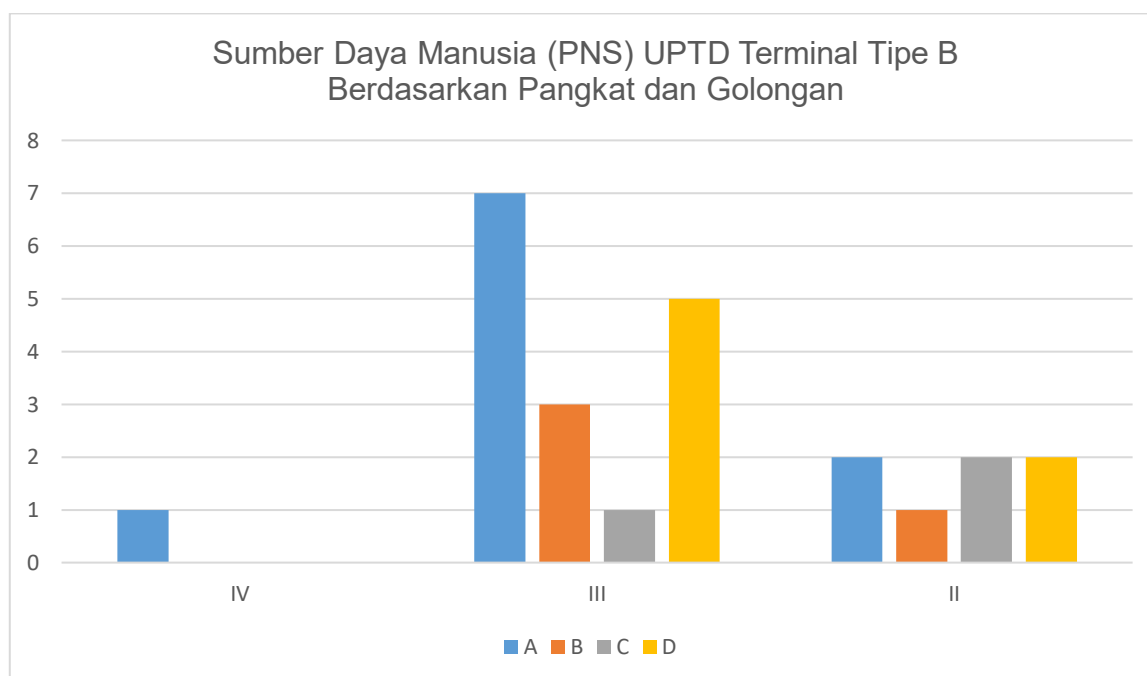
Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2024 disampaikan bahwa UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan bidang pengelolaan terminal angkutan antar kota dalam provinsi dan keterpaduan dengan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan, pelayanan penumpang, dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan Layanan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan.. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan dan/atau angkutan pedesaan;

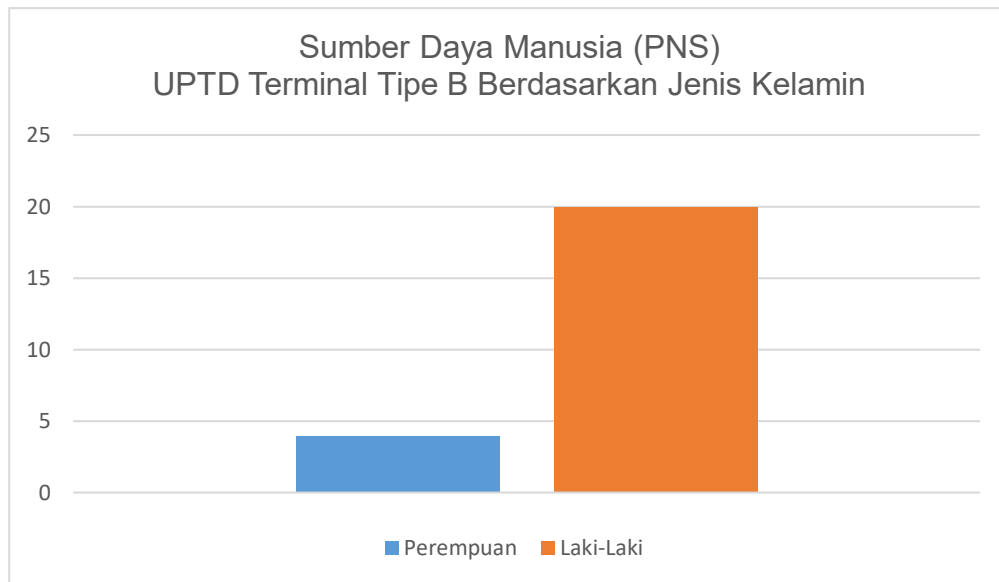
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
- d. pengoordinasian pembinaan dan pengaturan kegiatan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2024, UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 24 orang dengan rincian Kepala UPTD Terminal Tipe B 1 (satu), 3 (tiga) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 20 (dua puluh) Staf. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 5

Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Gambar 1. 6

Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Jenis Kelamin

D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 serta melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis. Permasalahan dan isu-isu strategis yang dimaksud adalah hasil dari analisis kondisi pelayanan serta evaluasi pada periode sebelumnya.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa pelaksanaan Renja PD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
3. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;

4. Sarana dan prasarana transportasi yang belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang
6. Belum optimalnya pelayanan dermaga penyeberangan
7. Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional dan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Kalimantan Selatan
8. Belum adanya transportasi berbasis rel,
9. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;

Dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu “Masih rendahnya ketersediaan angkutan umum yang menghubungkan antar Kawasan”.

E. `Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum pembentukan dan tugas pokok, struktur organisasi, isu strategis SKPD, Sistematika Penyajian.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan akuntabilitas kinerja organisasi berupa sasaran RPJMD dan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2025, menyajikan akuntabilitas keuangan berupa analisis anggaran dan realisasi pencapaian hasil tahun 2025 dan menyajikan perbandingan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan dan penetapan kinerja suatu perangkat daerah harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam hal ini RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kalsel Tahun 2025-2029 yang kemudian dijelaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra tersebut menjelaskan sasaran strategis jangka menengah yang menjadi pernyataan kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepala Daerah. Dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja tersebut disusun secara tahunan dan dilaporkan pada Laporan Kinerja ini.

Pernyataan sasaran strategis dan kinerja utama, serta detail RPJMD Prov Kalsel 2021 – 2025 dan 2025-2029 yang dicantumkan pada Sub Bab sebelumnya disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Visi-Misi RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2025 dan 2025-2029. Adapun Visi-Misi Kepala Daerah yang menjadi acuan tersebut disajikan pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2. 1
Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Visi	Misi
“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Tabel 2. 2
Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029

Visi	Misi
KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia 2. Pembangunan Infrastruktur Yang Handal 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata, Dan Syariah 4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim 5. Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat

Sasaran strategis jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 dijelaskan pada Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029. Seperti yang disampaikan sebelumnya, sasaran strategis tersebut harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran strategis beserta strategi, arah kebijakan dan hubungannya dengan RPJMD sebagai mana yang tertera pada Dokumen Renstra dijelaskan pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026			
Visi: KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Tujuan : Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan		Sasaran : Meningkatnya Konektivitas antar kawasan
RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan

Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	1. Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel 2. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di kawasan Banjarbakula 3. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 4. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan 5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Ontime Performance Layanan Transportasi	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebarkan dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan angkutan umum darat dan perairan yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi

	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.
Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutanjalan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek. 5. Menyelenggarakan operasional terminal type B. 6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas

			dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Tabel 2. 4
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029		
Visi: KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN		
Misi 2 : Pembangunan insfratraktur yang handal.	Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan	Sasaran : Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah
MISI 3: Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan , Merata, Dan Syariah	Tujuan : Menguatnya fondasi transformasi Ekonomi daerah yang berkelanjutan	Sasaran : Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik
RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029		
Opersionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD
Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Air	Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya	1. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di Kawasan Perkotaan 2. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

		Kabupaten/ Kota dan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan.
	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	1. Mendorong Koordinasi Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia II wilayah Kalimantan Selatan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu
	Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	1. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan untuk distribusi logistik
	Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)	1. Mendorong Koordinasi pengembangan pelabuhan pelabuhan di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi
	Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah	1. Mendorong Koordinasi data penumpang dan pengembangan fasilitas Bandara Syamsudin Noor dan bandara lainnya
	Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas	1. Meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas

	mengembangkan infrastruktur berkualitas untuk daerah potensi investasi	1. Mendorong peningkatan layanan angkutan barang untuk kelancaran distribusi barang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja yang dimaksud pada laporan ini adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang diuraikan pada laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang menggambarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Perumusan Perjanjian Kinerja tersebut didasari pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2. 5

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	0.65	KEPALA DINAS
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi	60	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	95 poin	
		Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	2 Inovasi	

		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4.01)	
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100.000 Keberangkatan	0.75	
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	Sekretaris
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	
	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD	100%	
		Persentase aset yang tercatat	100%	
	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	
	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	
		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal PD	Predikat SAKIP	AA	
	Meningkatnya Maturitas SPIP Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 Poin	
3	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	Kepala Sub

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 Orang	Bagian Umum dan Kepegawaian
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	
Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	
Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4 Paket	
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 Laporan	
Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Paket	
Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	

	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	
	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
4	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil	1 Dokumen	

		koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Laporan	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Data	
	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Dokumen	
	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 Orang/Bulan	
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	
	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	6 Dokumen	
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6 Laporan	

5	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0%	Kepala Bidang Pelayaran
		Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	75%	
		Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran	0,276	
		Persentase lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi	60 %	
		Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	100 %	
		Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam provinsi yang beroperasi	60 %	
		Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani	100 %	
		Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar	25,64 %	

6	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	9 Unit	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran
	Terawasnya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	4 Laporan	
7	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	Kepala Seksi angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa
	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	10 Unit	

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan		
8	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	10 Dokumen	Kepala Seksi Prasarana Pelayaran
9	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	50%	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
		Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2.25%	
		Persentase Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas	2.25%	
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi	25%	
		Persentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	20%	
		Persentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	100%	
10	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	Kepala Seksi Manajemen Dan

	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	Rekayasa Lalu Lintas Jalan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	
	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	
	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Dokumen	
11	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	488 Unit	Kepala Seksi Keselamatan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	522 Unit	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	12 Laporan	
	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	4 Dokumen	
	Tersedianya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	14 Lokasi	
	Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi	1 Dokumen	

	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi .		
12	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	14 Laporan	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas
13	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel	Persentase Teranglutnya Penumpang dan Barang	75 %	Kepala Bidang Angkutan Jalan
		Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	78.79 %	
		Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi	20 %	
		Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100 %	
		Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum	0.373 Rasio	
	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	80%	
14	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91 unit	Kepala Seksi Pemanduan Moda Dan

	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	Pengembangan
	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	
15	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Terminal
	Terlaksananya Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Dokumen	
	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	
	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit	

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	
	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	
	Terkendalinya dan Terawasnya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	
16	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam

	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	Trayek Dan Angkutan Barang
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	
17	Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Operasional Pelayanan Terminal tipe B	78 %	Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan
	Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	100%	
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	100%	
		Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	100%	
		Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar	60 %	

18	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan
	Terawasanya Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	5 Unit	
19	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal
20	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111 Laporan	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2025 Renstra 2021-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2. 6

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	Rasio Konektivitas Provinsi	0.65 Rasio	Kepala Dinas
	Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0.6 Nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	90 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90.01 Angka	
		Jumlah inovasi yang diterapkan	2 Inovasi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95 Poin	
		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4.01)	
		Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 3	
2	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	Persentase kegiatan tepat waktu	100%	Sekretaris
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	

		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	
		Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80 Angka	
		Nilai pendapatan UPT	100000000 Rupiah	
3	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100%	
	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	
	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	

4	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	
	Meningkatnya tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	
5	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air	0.62 Rasio	Kepala Bidang Pelayaran
6	Meningkatnya kelancaran pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	25.64 %	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran
7	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	100 %	Kepala Seksi angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa
	Meningkatnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan	100 %	

	Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan		
8	Tersedianya Data Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	60 %	Kepala Seksi Prasarana Pelayaran
9	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi	Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	100%	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
10	Meningkatnya Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	100%	Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	
11	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Jalan yang terpasang di jalan Provinsi sesuai standar	Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	100 %	Kepala Seksi Keselamatan Sarana

	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
	Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi	Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	100 %	
12	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas
13	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait angkutan jalan	Rasio Konektivitas Darat	0.63 Rasio	Kepala Bidang Angkutan Jalan
	Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretapihan di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100%	
14	Meningkatnya ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	100 %	Kepala Seksi Pemanduan Moda Dan Pengembangan
	Tersedianya kebijakan perencanaan jaringan jalur kereta api yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	100 Persen	
15	Meningkatnya penetapan Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	100 %	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas	100 %	

	Trayek Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan		Dan Terminal
	Tersedianya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	100 nilai	
	Meningkatnya Layanan Angkutan orang dalam trayek dan terminal	Persentase peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan orang dalam trayek dan terminal di wilayah provinsi	100 %	
16	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	100 %	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang
	Meningkatnya Ketersedian Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	100 %	
17	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu	100%	Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	
		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	
		Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan	100%	

		Sekretariat yang Ditindaklanjuti		
		Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80 Angka	
		Nilai pendapatan UPT	100000000 Rupiah	
	Meningkatnya pelayanan Terminal Penumpang Tipe B	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe B	100 Nilai	
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan
	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	5 Unit	
19	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal
20	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100 %	
	Meningkatnya kualitas	Persentase pelayanan jasa	100 %	

	layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100 %	
	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	
	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2025 Renstra 2025-2029 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

A.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima) kategori, serta maksimal pencatatan capaian ditetapkan tidak lebih dari 110%, dengan rincian kategori sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Rentang Capaian dan Katagori Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Di atas 100% sampai dengan 110%	Istimewa
II	Di atas 80 % sampai dengan 100 %	Baik
III	Di atas 60 % sampai dengan 80 %	Butuh Perbaikan
IV	Di atas 20 % sampai dengan 60 %	Kurang
V	Di atas 0 % sampai dengan 20 %	Sangat Kurang

Sumber Data: Permen PAN RB RI Nomor 22 Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Apabila realisasi semakin tinggi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Adapun rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk Kinerja Bermakna Positif Jika semakin besar realisasinya maka semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Untuk Kinerja Bermakna Negatif Jika semakin besar realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

1. Sasaran RPJMD

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu **“Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian”** bertujuan “Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan” dengan sasaran “Meningkatnya Konektivitas antar kawasan”. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 RPJMD 2021-2026

No	Sasaran strategis	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas antar Kawasan	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Perairan	Rasio Konektivitas	0.65	0.649	99.85%
RATA-RATA CAPAIAN						99.85 %

Sumber data: RPJMD 2021-2026 dan laporan kinerja bulan desember 2025

Rasio Konektivitas ditentukan oleh Konektivitas Transportasi Perairan dan Konektivitas Transportasi darat. Cara perhitungannya Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan dan Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan.

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator kinerja	Target RPJMD					Realisasi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Capaian % 2025
1	Rasio Konektivitas	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,59	0,603	0,603	0,649	0,649	99.85%
Rata-Rata Capaian												99.85%

Sumber data : LAKIP 2021-2024

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Misi 2 dengan **“Pembangunan infrastruktur yang handal”** bertujuan “Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan” dengan sasaran “Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah” dan Misi 3 dengan **“Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan , Merata, Dan Syariah”** bertujuan “Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan” dengan sasaran “Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik”. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 RPJMD 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD / PK Gubernur	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Rasio Konektivitas Darat	0,63	0,69	110 %
		Rasio Konektivitas Air	0,62	0,64	103 %
2	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Rasio Konektivitas Darat	0,63	0,69	110 %
Rata-Rata Capaian					107 %

Sumber data: RPJMD 2025-2029 dan Laporan Kinerja Bulan desember 2025

Rasio Konektivitas ditentukan oleh Konektivitas Transportasi Perairan dan Konektivitas Transportasi darat. Cara perhitungannya Jumlah kawasan perkotaan yang telah dioperasikan angkutan massal dibanding Jumlah kawasan perkotaan dalam RTRW dan Jumlah terminal Tipe B yang telah dioperasikan dibanding *Jumlah lokasi terminal AKAP /ALBN* sesuai Keputusan Menteri dan *Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani angkutan penyeberangan* dibanding *Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Eksisting dan Rencana Pelabuhan Penyeberangan dalam RIPN*

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi RPJMD 2025-2029

No	Indikator kinerja	Target	Tahun 2025	
		2025	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas Darat	0,63	0,69	110 %
2	Rasio Konektivitas Air	0,62	0,64	103 %
Rata-Rata Capaian				107 %

Sumber data : RPJMD 2025-2029 dan Laporan Kinerja Bulan desember 2025

Perbandingan Rasio Konektivitas Kalimantan Selatan dengan Provinsi Se-Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan

Indikator Kinerja : Rasio Konektivitas Provinsi												
No	Provinsi	Target					Realisasi					Capaian 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kalimantan Selatan	0.63	0.59	0.61	0.63	0.65	0.59	0.603	0.603	0.649	0.67	103 %
2	Kalimantan Timur	0.798	0.816	0.834	0.846	-	0.798	0.816	0.834	0.846	-	-
3	Kalimantan Barat	0.73	0.74	0.75	0.80	-	0.73	0.75	0.75	0.80	-	-
4	Kalimantan Tengah	0.64	0.65	0.66	0.67	-	0.642	0.648	0.651	0.665	-	-
5	Kalimantan Utara	0.55	0.55	0.65	0.80	-	0.62	0.69	0.70	0.70	-	-

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Perbandingan			
		Target Kalsel	Realisasi Kalsel	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Rasio Konektivitas	0,65	0,67	0,82	0,695

Sumber: Kementerian Perhubungan RI

Perbandingan Indikator Kinerja Kalimantan Selatan dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8

Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's Tahun 2025

No	Indikator Kinerja SDG's	Perbandingan	
		Target SDG's	Realisasi Kalsel
1	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi	1.250.000 Orang	1.257.910 Orang
2	Jumlah pelabuhan penyeberangan	7 Dermaga	7 Dermaga
3	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 terealisasi sebesar 0.649 dari target 0.65 sehingga persentase capaian Rasio Konektivitas Provinsi pada tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 99.85%. Nilai tersebut menyatakan bahwa Rasio Konektivitas Provinsi di Kalimantan Selatan berstatus Baik. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkat dengan Baik.

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 terealisasi sebesar 0.67 dari target 0.65 sehingga persentase capaian Rasio Konektivitas Provinsi pada tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 103%. Dimana Rasio Konektivitas provinsi dibagi 2 menjadi Rasio Konektivitas Darat dengan target 0,63 realisasi 0,69 dan capaian 110 % dan Rasio Konektivitas Air dengan target 0,62 realisasi 0,64 capaian 103 %. Nilai tersebut menyatakan bahwa Rasio Konektivitas Provinsi di Kalimantan Selatan berstatus Istimewa. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkat dengan Sangat Memuaskan.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yaitu “Rasio Konektivitas Provinsi” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0.649 dengan capaian 99.85 %. Realisasi tersebut sama dengan realisasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 0.649 dengan capaian 103%. Dilihat dari data tersebut capaian dan realisasi sama dengan tahun 2024 dan tahun 2025.

Pada indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 yaitu “Rasio Konektivitas Provinsi” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0.67 dengan capaian 103 %. Realisasi tersebut naik dengan realisasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 0.649 dengan capaian 103%. Dilihat dari data tersebut capaian dan realisasi naik dari tahun 2024.

Jika dilakukan perbandingan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 0.649 dan capaian 99.85 % dengan realisasi kinerja 0,59 capaian 100% tahun 2021, tahun 2022 sebesar 0.603 capaian 102 %, tahun 2023 sebesar 0.603 capaian 98.85 %, tahun 2024 sebesar 0.649 capaian 103 %. Dibandingkan dari tahun 2021 – 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi rata-rata 0.61 dan capaian 101 % dan realisasi tahun 2025 0.649 dan capaian 99.85 %.

Jika dilakukan perbandingan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 0.67 dan capaian 103 % dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 0.649 dan capaian 99.85 % dengan realisasi kinerja 0,59 capaian 100% tahun 2021, tahun 2022 sebesar 0.603 capaian 102 %, tahun 2023 sebesar 0.603 capaian 98.85 %, tahun 2024 sebesar 0,649 capaian 103 %. Dibandingkan dari tahun 2021 – 2025 mengalami peningkatan dengan realisasi rata-rata 0.62 dan capaian 101 % dan realisasi tahun 2025 RPJMD 2025- 2029 0.67 dan capaian 103 % dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029.

Jika dilakukan perbandingan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yaitu “Rasio Konektivitas Provinsi” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0.649 dengan capaian 99.85 % dengan target nasional 0,82 dan realisasi 0,695 masih belum tercapainya kinerja di provinsi kalimantan selatan karena untuk nasional melingkupi transportasi darat, air dan udara di provinsi kalimantan selatan melingkupi transportasi darat dan air.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultasi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.
- Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula
- Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu)
- Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin)
- Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin
- Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours
- Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan, Pemberlakuan, Pengawasan dan Pengendalian Tarif Angkutan Umum
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu

Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan-jalan Yang Perioritas Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat.

- Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab. Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru)
- Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (Lhr), Pelaksanaan Fgd U Turn A. Yani, Kajian Drk Jalan Baru Bjb-Btl, Penataan Drk Kab.Banjar, Lhr Kota Bjm, Bjb Dan Kab. Banjar, Kajian Drk Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu.
- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinasi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia
- Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti.
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada
- Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Aturan Berubah untuk halte tidak perlu ukl/upl sedangkan simpul terminal tipe C ada di kabupaten dan Terminal tipe B ada di Provinsi sedangkan simpul terpecah – pecah 6 Kabupaten kota sehingga dengan waktu relatif singkat tidak mencukupi waktu pelaksanaan.
- Alat On Board Unit (OBU) belum masuk RK BMD dan proses Reclass (pemindahan pemanfaatan barang) di tahun 2025.
- Konsep tentang skema pembangunan perkeretaapian perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan R.I. dikarenakan jalur yang sekarang merupakan jalur Trans Kalimantan.
- Belum adanya database perijinan yang terpadu menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi legalitas operasional kendaraan.
- Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan faktor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan, SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkau dan rusak, peralatan pembersih alur yang sulit di temukan untuk sesuai di lapangan dan semakin menurunnya minat Masyarakat untuk menaiki kapal angkut karena banyaknya sudah dibangun jalan dan jembatan penghubung.
- Hambatan yang dihadapi semakin banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang Buku Uji Kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT), Kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Dokumen Andalalin bagi kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas masih kurang, Perlengkapan peralatan Survey Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas belum memadai, Kepatuhan para pembangun terhadap rekomendasi Andalalin belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi seperti halte
- Melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan Marka Jalan, Paku Marka Jalan, Pju Ac Konvensional Tiang Single, Pju Ac Konvensional Tiang Double, Rambu Chevron, Rambu Jalan Dan Apill Otonom
- Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan seperti halte

- Melaksanakan Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar seperti Pju Ac Kabel Tanam Dan Pju Ac Kabel Udara
- Melaksanakan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR)
- Melaksanakan pelajar pelopor
- Melaksanakan Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, Menunjang Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota se Kalimantan Selatan
- Melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas seperti Kerucut lalu lintas (rubber cone)
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait seperti Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan proses dan prosedur izin penyelenggaraan angkutan taksi sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru (berlaku)
- DED DED / Detail Engineering Design Penyediaan Angkutan Umum (Wilayah Saijaan Bersujud (Kab.Kotabaru Dan Tanah Bumbu))
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultasi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.
- Melaksanakan Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Sungai
- Melaksanakan Pekerjaan alur sungai danau panggang menuju sungai Paminggir dan kecamatan babirik Kab. Hulu Sungai Utara
- Mengoptimalkan pemanfaatan media online (website dishub, wa dan IG) untuk pemenuhan perolehan izin usaha jasa terkait dan angkutan laut

pelayaran rakyat dan koordinasi dengan instansi terkait (Otoritas Pelabuhan).

- Melaksanakan kolaborasi dan Kerjasama dengan Polairut Polda Kalsel, Dishub Kab/Kota dan relawan untuk kegiatan pengamanan kapal pengangkut penumpang atau barang.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Rasio Konektivitas Provinsi tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang berkontribusi terhadap naiknya capaian kinerja dan efektivitasnya yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 9
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum - Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar - Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain). - Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan	1. Cakupan layanan angkutan umum semakin luas dan terintegrasi 2. Peningkatan kualitas dan keselamatan layanan angkutan umum 3. Keberpihakan pada kelompok rentan dan pengguna prioritas 4. Perencanaan transportasi berbasis kajian dan kebutuhan wilayah 5. Dukungan konektivitas transportasi perairan dan logistik daerah

		Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala. - Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula - Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu) - Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin) - Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin - Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours 2. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput	

		Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B - Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi Program Pengelolaan Pelayaran 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang	
2	RENSTRA 2021-2026 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya layanan Transportasi yang aman,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi - Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan2 Yang Prioritas Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat. 3. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1. Peningkatan layanan angkutan umum antarwilayah provinsi 2. Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan provinsi 3. Pengendalian beban jalan dan perlindungan infrastruktur 4. Kelancaran arus lalu lintas pada momen strategis dan kegiatan berskala besar 5. Tertibnya pemanfaatan ruang jalan melalui pengawasan Andalalin

	nyaman dan terjangkau	- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinansi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia - Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebanban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti. 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi - Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada	
3	RENSTRA 2021-2026 1. Meningkatnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan dan penganggaran yang terarah dan selaras antarlevel pemerintahan

	Kualitas Pelayanan Publik RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	- Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 - Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, Perubahan RKA, Perubahan DPA tahun 202dan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Sipencatar, Pelatihan Awak Pengemudi BRT, Program Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan lainnya - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Hosting domain web dan pemeliharaan aplikasi web)	2. Pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu 3. Peningkatan kapasitas SDM dan efektivitas administrasi perangkat daerah 4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Eselon II pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung indikator RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rasio Konektivitas dengan sasaran “**Meningkatnya Konektivitas antar kawasan**”. Capaian indikator pada sasaran ini mempunyai andil terhadap keberhasilan capaian Rasio Konektivitas di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	0.65	0.649	99.85
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi	60	67.5	110
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	95 poin	92.11 Poin	96.96
		Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	2 Inovasi	2 Inovasi	100
		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4.01)	Sangat Baik 4.17	104
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100.000 Keberangkatan	0.75	0	110
RATA-RATA CAPAIAN					103.5

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Rasio Konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan})$
- $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = \frac{(\text{Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi Bobot Trayek})}{(\text{Dibagi Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Provinsi Tersebut})}$
- $IK2 (\text{Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan}) = \frac{(\text{Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut} \times \text{Bobot Lintas})}{(\text{Dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut)})}$
- *On time performance* layanan transportasi
On time performance (OTP) adalah suatu keadaan ketika waktu keberangkatan dan waktu kedatangan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan

$$OTP \text{ Angkutan sungai (bobot 50\%)} + OTP \text{ Angkutan jalan (bobot 50\%)}$$
- Indeks kepuasan masyarakat

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Oleh setiap Instansi Pemerintah kepada Masyarakat sebagai penerima layanan sata sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkesinambungan :

Metode survey

- Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
Guna memaksimalkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat dan mencapai kepuasan masyarakat, Dinas Perhubungan terus merancang inovasi yaitu Sistem aplikasi Manajemen Pengawasan BTS dan Sistem GIS Sidara Bungas.
- Indeks Pelayanan Publik
Indeks pelayanan publik perangkat daerah merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik (PEKPPP) Mandiri yang dikoordinir oleh Biro Organisasi dan Tim Pembinaan Pelayanan Publik.

Nilai Aspek Kriteria Penilaian Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Publik (PEKPPP) Mandiri x Bobot Nilai yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi

- Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan
Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi

$$\frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang}}{100.000 \text{ Keberangkatan}}$$

Perbandingan indikator Eselon II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 11

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	% Capaian
1	Rasio Konektivitas	0,57	0,59	0,61	0,63	0.65	0,59	0.603	0.603	0.649	0.649	99.85
2	On time performance layanan transportasi	34	58,5	58,5	59	60	34	75.5	55.5	72,5	67.5	110
3	Indeks kepuasan masyarakat	77,5	81,3	81,5	90	95	80,2	78.9	82.5	88.32	92.11	96.96
	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	100
	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	Sangat Baik (4.01)	-	-	-	-	Sangat Baik 4.17	104
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan	2,73	2,65	2,6	1,6	0.75	0	3.075	1.2	0	0	110
RATA-RATA CAPAIAN												103,5 %

Sumber : RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026 dan LAKIP Dinas Perhubungan 2021-2024

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Misi 2 dengan **“Pembangunan infrastruktur yang handal”** bertujuan “Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan” dengan sasaran “Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah” dan Misi 3 dengan **“Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan , Merata, Dan Syariah”** bertujuan “Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan” dengan sasaran “Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik”. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	Rasio Konektivitas Provinsi	0.65 Rasio	0.67 Rasio	103
2	Meningkatnya layanan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0.6 Nilai	0.66 Nilai	90.90
	Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	90 Nilai	93.50 Nilai	104
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90.01 Angka	83.8 Angka	93.10
		Jumlah inovasi yang diterapkan	2 Inovasi	2 Inovasi	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95 Poin	92.11 Poin	96.96
		Indeks Pelayanan Publik	(Sangat Baik) 4.01	(Sangat Baik) 4.17	104
		Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 3	Level 2.336	77.87
RATA-RATA CAPAIAN					96,2 %

Rumus Perhitungan :

- Rasio Konektivitas Provinsi =

Jumlah kawasan perkotaan yang telah dioperasikan angkutan massal dibanding Jumlah kawasan perkotaan dalam RTRW dan Jumlah terminal Tipe B yang telah dioperasikan dibanding *Jumlah lokasi terminal AKAP /ALBN* sesuai Keputusan Menteri dan *Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani angkutan penyeberangan* dibanding *Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Eksisting dan Rencana Pelabuhan Penyeberangan dalam RIPN*

- V/C Ratio di Jalan Provinsi

V/C Rasio antara volume lalu lintas kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut dalam satuan waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan efisiensi jalan provinsi dalam melayani arus lalu lintas. Semakin tinggi nilai V/C Ratio, semakin besar beban lalu lintas yang ditanggung oleh jalan tersebut, dan jika nilainya mendekati atau melebihi 1,0, maka menandakan terjadinya kepadatan atau kemacetan lalu lintas.

$V/C \text{ Ratio Di Jalan Provinsi} = \text{Volume Kendaraan (V)} / \text{Kapasitas Jalan (C)}$

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
Suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Indeks ini mencerminkan persepsi pengguna terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, dan kemudahan akses.

Metode survey

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Bentuk Pertanggung jawaban Perangkat Daerah atas penggunaan Keuangan (Anggaran), terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja.

Penilaian dilakukan oleh TIM Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah

- Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah
Maturitas SPIP berarti tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdefinisi. Artinya, praktik pengendalian intern sudah terdokumentasi dengan baik

Hasil Penilaian Inspektorat

- Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah
Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. IKM ini mencakup penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, transparansi, kenyamanan, dan profesionalitas aparatur.

Metode survey

- Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
Guna memaksimalkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat dan mencapai kepuasan masyarakat, Dinas Perhubungan terus merancang inovasi

yaitu Sistem aplikasi Manajemen Pengawasan BTS dan Sistem GIS Sidara Bungas.

jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

- Indeks Pelayanan Publik
- Indeks pelayanan publik perangkat daerah merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik (PEKPPP) Mandiri yang dikoordinir oleh Biro Organisasi dan Tim Pembinaan Pelayanan Publik.

Nilai Aspek Kriteria Penilaian Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Publik (PEKPPP) Mandiri x Bobot Nilai yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi

Tabel 3. 13
Perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Provinsi RPJMD 2025-2029

No	Indikator kinerja	Target	Tahun 2025	
		2025	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0,65	0,67	103 %
Rata-Rata Capaian				103 %

Sumber data : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan RENSTRA 2025-2029

Perbandingan Rasio Konektivitas Kalimantan Selatan dengan Provinsi Se-Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan

Indikator Kinerja : Rasio Konektivitas Provinsi										
No	Provinsi	Target				Realisasi				Capaian 2024
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Kalimantan Selatan	0.63	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
2	Kalimantan Timur	0,798	0,816	0,834	0,846	0,798	0,816	0,834	0,846	100%
3	Kalimantan Barat	0.73	0.74	0.75	0.80	0.73	0.75	0.75	0.80	100%
4	Kalimantan Tengah	0,64	0,65	0,66	0,67	0,642	0,648	0,651	0,665	99,25%
5	Kalimantan Utara	0,55	0,55	0,65	0,80	0,62	0,69	0,70	0,70	87,5%

Perbandingan Rasio Konektivitas Kalimantan Selatan dengan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 15

Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Perbandingan			
		Target Kalsel	Realisasi Kalsel	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Rasio Konektivitas	0,65	0,67	0,82	0,695

Sumber: Kementerian Perhubungan RI

Perbandingan Indikator Kinerja Kalimantan Selatan dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16

Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's Tahun 2025

No	Indikator Kinerja SDG's	Perbandingan	
		Target SDG's	Realisasi Kalsel
1	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi	1.250.000 Orang	1.257.910 Orang
2	Jumlah pelabuhan penyeberangan	7 Dermaga	7 Dermaga
3	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

- RENSTRA TAHUN 2021-2026

a. Rasio Konektivitas

Capaian sasaran Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan dengan realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas pada tahun 2025 sebesar 0.649 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.65 sehingga persentase capaian sebesar 99.85%.

b. On Time Performance Layanan Transportasi

Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi pada tahun 2025 sebanyak 67.5 dengan target yang ditetapkan yaitu 60 sehingga persentase capaian sebesar 110%.

- c. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat , Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan, dan Indeks pelayanan publik yaitu 100,32 %.

- d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 92.11 poin dengan target yang ditetapkan yaitu 95 poinn sehingga persentase capaian sebesar 96.96%.

- e. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

Pada Indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada tahun 2025 sebanyak 2 inovasi dengan target 2 inovasi sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- f. Indeks pelayanan publik

Pada Indikator kinerja yaitu Indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebanyak 4.17 (sangat baik) dengan target 4.01 (sangat baik) sehingga persentase capaian sebesar 104%.

- g. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 keberangkatan

Capaian sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2025 Sebesar 0 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 0.75 Sehingga persentase capaian sebesar 110 %

- RENSTRA TAHUN 2021-2026

- a. Rasio Konektivitas Provinsi

Capaian sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan dengan Realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2025 sebesar 0.67 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.65 sehingga persentase capaian sebesar 103%.

- b. Capaian Sasaran Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau dengan indikator V/C Ratio di jalan Provinsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi yaitu 97,45 %.

c. V/C Ratio di jalan Provinsi

Pada indikator kinerja yaitu V/C Ratio di jalan Provinsi pada tahun 2025 sebesar 0.66 dengan target 0.66 sehingga persentase capaian 90.90%.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Pada Indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2025 sebesar 93.50 dengan target 90 dan persentase capaian 104%.

e. Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Jumlah inovasi yang diterapkan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah yaitu 94,4%.

f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada Indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 83.8 dengan target 90.01 dan persentase capaian 93.10%.

g. Jumlah Inovasi yang diterapkan

Pada Indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi yang diterapkan pada tahun 2025 sebanyak 2 inovasi dengan target 2 inovasi sehingga persentase capaian sebesar 100%.

h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah tahun 2025 sebanyak 92.11 poin dengan target yang ditetapkan yaitu 95 poin sehingga persentase capaian sebesar 96.96%.

i. Indeks Pelayanan Publik

Pada Indikator kinerja yaitu Indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebanyak 4.17 (sangat baik) dengan target 4.01 (sangat baik) sehingga persentase capaian sebesar 104%.

h. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Pada Indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebanyak level 2.336 dengan target level 3 sehingga persentase capaian sebesar 77.87%.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2025 dengan RENSTRA 2021-2026 realisasi indikator kinerja yaitu :

- a. Rasio konektivitas sebesar 0.649 dan persentase capaian sebesar 99.85% dan tahun 2024 realisasi 0.649 dan capaian 103% dari realisasi tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perbedaan dengan realisasi nasional sebesar 0.695 maka terdapat selisih 0,046 dari realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan realisasi nasional termasuk transportasi darat, air dan udara sedangkan provinsi hanya transportasi darat dan air, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 0,61 dan capaian rata-rata 102% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 0,039 capaian 1%.
- b. Indikator Kinerja On Time Performance Layanan Transportasi pada tahun 2025 sebanyak 67.5 dan persentase capaian sebesar 110% dan tahun 2024 realisasi 72.5 dan capaian 122 % dari realisasi tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan pada tahun 2025 perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 59,4 dan capaian rata-rata 111,5% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 8.1.
- c. Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 92.11 poin dan persentase capaian sebesar 96.96% pada tahun 2024 realisasi sebesar 88.32 dan capaian 98.13 % dari realisasi 2024 dan 2025 mengalami kenaikan, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 82,48 dan capaian rata-rata 99,8% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 9,63.
- d. Indikator kinerja Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada tahun 2025 sebanyak 2 inovasi dan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2024 realisasi sebesar 2 inovasi dan persentase capaian sebesar 100% dari realisasi 2024 dan 2025 tidak mengalami perbedaan, perbandingan indikator dari tahun 2023-2024 memiliki rata-rata realisasi 2 inovasi dan capaian rata-rata 100% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi tidak terjadi perubahan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 2 inovasi capaian 100%.
- e. Indikator kinerja Indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebanyak 4.17 (sangat baik) dan persentase capaian sebesar 104% pada tahun 2024 indikator belum tersedia, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 tidak adanya indikator yang tersedia.

- f. Indikator kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan pada Tahun 2025 Sebesar 0 dan persentase capaian sebesar 110 % pada tahun 2024 realisasi sebesar 0 dan persentase capaian sebesar 110% dari realisasi 2024 dan 2025 tidak mengalami perbedaan, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 1,07 dan capaian rata-rata 97% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami penurunan, indikator ini termasuk indikator negatif.

Pada tahun 2025 dengan RENSTRA 2025-2029 realisasi indikator kinerja yaitu :

- a. Rasio konektivitas provinsi sebesar 0.67 dan persentase capaian sebesar 103% dan tahun 2024 realisasi 0.649 dan capaian 103% dari realisasi tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perbedaan dengan realisasi nasional sebesar 0.695 maka terdapat selisih 0,046 dari realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan realisasi nasional termasuk transportasi darat, air dan udara sedangkan provinsi hanya transportasi darat dan air, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 0,61 dan capaian rata-rata 102% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 0,039 capaian 1%, dan adanya perubahan rumus perhitungan di renstra 2025-2029.
- b. Indikator Kinerja V/C Ratio di Jalan Provinsi pada tahun 2025 sebesar 0.66 dengan target 0.66 sehingga persentase capaian 90.90% untuk perbandingan tahun sebelumnya tidak ada tersedia.
- c. Pada Indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2025 sebesar 93.50 dengan target 90 dan persentase capaian 104%, tidak tersedianya perbandingan tahun sebelumnya karena renstra terbaru.
- d. Pada Indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 83.8 dengan target 90.01 dan persentase capaian 93.10%, tidak tersedianya perbandingan tahun sebelumnya karena renstra terbaru.
- e. Indikator kinerja Jumlah Inovasi yang diterapkan pada tahun 2025 sebanyak 2 inovasi dan persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2024 realisasi sebesar 2 inovasi dan persentase capaian sebesar 100% dari realisasi 2024 dan 2025 tidak mengalami perbedaan, perbandingan indikator dari tahun 2023-2024 memiliki rata-rata realisasi 2 inovasi dan capaian rata-rata 100%

dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi tidak terjadi perubahan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 2 inovasi capaian 100%.

- f. Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebanyak 92.11 poin dan persentase capaian sebesar 96.96% pada tahun 2024 realisasi sebesar 88.32 dan capaian 98.13 % dari realisasi 2024 dan 2025 mengalami kenaikan, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 memiliki rata-rata realisasi 82,48 dan capaian rata-rata 99,8% dibandingkan tahun 2025 untuk realisasi mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya sebesar 9,63.
- g. Indikator kinerja Indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebanyak 4.17 (sangat baik) dan persentase capaian sebesar 104% pada tahun 2024 indikator belum tersedia, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 tidak adanya indikator yang tersedia.
- h. Indikator kinerja Indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebanyak 4.17 (sangat baik) dan persentase capaian sebesar 104% pada tahun 2024 indikator belum tersedia, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 tidak adanya indikator yang tersedia.
- i. Indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebanyak level 2.336 dengan target level 3 sehingga persentase capaian sebesar 77.87%, pada tahun 2024 indikator belum tersedia, perbandingan indikator dari tahun 2021-2024 tidak adanya indikator yang tersedia.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.

- Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula
- Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu)
- Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin)
- Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin
- Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours
- Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan, Pemberlakuan, Pengawasan dan Pengendalian Tarif Angkutan Umum
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan-jalan Yang Perioritas Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat.
- Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab. Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru)
- Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (Lhr), Pelaksanaan Fgd U Turn A. Yani, Kajian Drk Jalan Baru Bjb-Btl, Penataan Drk Kab.Banjar, Lhr Kota Bjm, Bjb Dan Kab. Banjar, Kajian Drk Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu.

- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinasi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia
- Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti.
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada
- Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Aturan Berubah untuk halte tidak perlu ukl/upl sedangkan simpul terminal tipe C ada di kabupaten dan Terminal tipe B ada di Provinsi sedangkan simpul terpecah – pecah 6 Kabupaten kota sehingga dengan waktu relatif singkat tidak mencukupi waktu pelaksanaan.
- Alat On Board Unit (OBU) belum masuk RK BMD dan proses Reclass (pemindahan pemanfaatan barang) di tahun 2025.
- Konsep tentang skema pembangunan perkeretaapian perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan R.I. dikarenakan jalur yang sekarang merupakan jalur Trans Kalimantan.
- Belum adanya database perijinan yang terpadu menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi legalitas operasional kendaraan.
- Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan faktor alam serta

factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan, SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkai dan rusak, peralatan pembersih alur yang sulit di temukan untuk sesuai di lapangan dan semakin menurunnya minat Masyarakat untuk menaiki kapal angkut karena banyaknya sudah dibangun jalan dan jembatan penghubung.

- Hambatan yang dihadapi semakin banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang Buku Uji Kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT), Kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Dokumen Andalalin bagi kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas masih kurang, Perlengkapan peralatan Survey Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas belum memadai, Kepatuhan para pembangun terhadap rekomendasi Andalalin belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi seperti halte
- Melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan Marka Jalan, Paku Marka Jalan, Pju Ac Konvensional Tiang Single, Pju Ac Konvensional Tiang Double, Rambu Chevron, Rambu Jalan Dan Apil Otonom
- Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan seperti halte
- Melaksanakan Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar seperti Pju Ac Kabel Tanam Dan Pju Ac Kabel Udara
- Melaksanakan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR)
- Melaksanakan pelajar pelopor
- Melaksanakan Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, Menunjang Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota se Kalimantan Selatan
- Melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

- Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas seperti Kerucut lalu lintas (rubber cone)
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait seperti Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan proses dan prosedur izin penyelenggaraan angkutan taksi sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru (berlaku)
- DED DED / Detail Engineering Design Penyediaan Angkutan Umum (Wilayah Saijaan Bersujud (Kab.Kotabaru Dan Tanah Bumbu))
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.
- Melaksanakan Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Sungai
- Melaksanakan Pekerjaan alur sungai danau panggang menuju sungai Paminggir dan kecamatan babirik Kab. Hulu Sungai Utara
- Mengoptimalkan pemanfaatan media online (website dishub, wa dan IG) untuk pemenuhan perolehan izin usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat dan koordinasi dengan instansi terkait (Otoritas Pelabuhan).
- Melaksanakan kolaborasi dan Kerjasama dengan Polairut Polda Kalsel, Dishub Kab/Kota dan relawan untuk kegiatan pengamanan kapal pengangkut penumpang atau barang.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 17
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum - Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar - Melaksanakan Konsultasi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain). - Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala. - Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula	1. Cakupan layanan angkutan umum semakin luas dan terintegrasi 2. Peningkatan kualitas dan keselamatan layanan angkutan umum 3. Keberpihakan pada kelompok rentan dan pengguna prioritas 4. Perencanaan transportasi berbasis kajian dan kebutuhan wilayah 5. Dukungan konektivitas transportasi perairan dan logistik daerah

		- Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu) - Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin) - Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin - Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours 2. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	

		3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B - Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi Program Pengelolaan Pelayaran 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang	
2	RENSTRA 2021-2026 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum 5. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi - Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan-jalan Yang Perioritas	1. Peningkatan layanan angkutan umum antarwilayah provinsi 2. Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan provinsi 3. Pengendalian beban jalan dan perlindungan infrastruktur 4. Kelancaran arus lalu lintas pada momen strategis dan kegiatan berskala besar 5. Tertibnya pemanfaatan ruang jalan melalui pengawasan Andalalin

		Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat. 6. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinansi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia - Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti.	

		7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi - Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada	
3	RENSTRA 2021-2026 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 - Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, Perubahan RKA, Perubahan DPA tahun 202dan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Sipencatar, Pelatihan Awak Pengemudi BRT, Program Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan lainnya - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan	1. Perencanaan dan penganggaran yang terarah dan selaras antarlevel pemerintahan 2. Pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu 3. Peningkatan kapasitas SDM dan efektivitas administrasi perangkat daerah 4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital

		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Hosting domain web dan pemeliharaan aplikasi web)	

3. Eselon III (Sekretaris)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3. 18

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100 %	100
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100 %	100
2	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD	100%	92,39 %	92,39
		Persentase aset yang tercatat	100%	100 %	100
3	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100 %	100
4	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	100 %	100
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100 %	100

		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100 %	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal PD	Predikat SAKIP	(AA) 90,01	(A) 83.8 Angka	93.10
6	Meningkatnya Maturitas SPIP Internal Perangkat Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2.336	77.87
7	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 Poin	94 Poin	94
RATA-RATA CAPAIAN					96,12

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD

$$\frac{\text{Jumlah komponen pelaporan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan}}{\text{Jumlah komponen pelaporan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan}} \times 100\%$$
- Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD

$$\frac{\text{Jumlah komponen perencanaan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan}}{\text{Jumlah komponen perencanaan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan}} \times 100\%$$
- Persentase penyerapan anggaran SOPD

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi anggaran dibagi dengan rencana anggaran} \times 100\%}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$$
- Pesentase Aset Yang Tercatat

$$\frac{\text{Jumlah Aset Yang Dicatat bagi jumlah Asset seluruhnya} \times 100\%}{\text{Jumlah Asset Yang Dicatat}} \times 100\%$$
- Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Perhubungan

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasarana yang di butuhkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Asset Seluruhnya}} \times 100\%$$

Jumlah sarana prasarana yang ada X 100%

Jumlah sarana prasarana yang di butuhkan

- Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian

Pegurusan administrasi kepegawaian yang terpenuhi X 100%

Pegurusan administrasi kepegawaian yang di butuhkan

- Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 dibagi jumlah

ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 X 100%

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian X 100%

Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan memiliki sertifikat keahlian

- Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 dibagi jumlah

ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 X 100%

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek X 100%

Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek

- Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Metode survey terhadap layanan kesekretariatan

- Predikat SAKIP

Penilaian dilakukan oleh TIM Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah

- Tingkat Maturitas SPIP

Hasil Penilaian Inspektorat

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 19

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Persentase penyerapan anggaran SOPD	85,77 %	93.94 %	96,50%	79,67 %	100%	92,39 %	92,39 %
4	Persentase aset yang tercatat	100%	100%	97,69%	100%	100%	100 %	100 %
5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Predikat SAKIP	-	-	-	-	(AA) 90,01	(A) 83.8 Angka	93.10
10	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	-	Level 3	Level 2.336	77.87
11	Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	100 Poin	94 Poin	94
Rata-Rata Capaian								96,12 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 20

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat	Persentase kegiatan tepat waktu	100%	92.39	92.39
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	100%	100

Dearah Layanan Dinas Perhubungan	Serta UPT	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	100 Nilai	100
		Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100
		Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	100%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80 Angka	70 Angka	87.5
		Nilai pendapatan UPT	100000000 0 Rupiah	154.448.000 Rupiah	110
RATA-RATA CAPAIAN					99 %

Sumber : Laporan Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Persentase kegiatan tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

- Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah laporan/telaah yang selesai tepat waktu}}{\text{Total laporan/telaah yang ditugaskan}} \times 100\%$$

- Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal

$$\frac{\text{Jumlah item administrasi yang dipatuhi}}{\text{Jumlah total item yang diwajibkan}} \times 10$$

- Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Aduan yang Masuk}} \times 100\%$$

- Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat

$$\frac{\sum \text{Skor aktual}}{\sum \text{Skor maksimal}} \times 100$$

- Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT

Metode survey terhadap layanan Terminal

- Nilai pendapatan UPT

Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya + 10%

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kegiatan tepat waktu	92.39	100%	92.39	92.39
2	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	100%	100%	100
3	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100
4	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100
5	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	100%	100%	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	70 Angka	80 Angka	70 Angka	87.5
7	Nilai pendapatan UPT	154.448.000 Rupiah	100000000 Rupiah	154.448.000 Rupiah	110
RATA-RATA CAPAIAN					99 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

2. Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Pelayanan Administrasi Keuangan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 96 % dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase penyerapan anggaran SOPD dengan target 100% mendapatkan realisasi 92.39% dan capaian kinerja sebesar 92,39 % pada tahun 2025.
2. Persentase aset yang tercatat dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD dengan target 100% mendapatkan realisasi 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Peningkatan kualitas SDM OPD mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian dengan target 100% mendapatkan realisasi 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.
2. Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian dengan target 100% mendapatkan realisasi 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.
3. Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham dengan target 100% mendapatkan realisasi 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal PD mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 93.10 % dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Predikat SAKIP dengan target 90.01 mendapatkan realisasi 83.8 dan capaian kinerja sebesar 83.8 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya Maturitas SPIP Internal Perangkat Daerah mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 77.87 % dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3 mendapatkan realisasi level 2.336 dan capaian kinerja sebesar 77.87 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 94% dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dengan target 100 Poin mendapatkan realisasi 94 Poin dan capaian kinerja sebesar 94% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2026 sasaran strategis Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 99% dan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase kegiatan tepat waktu dengan target 100% mendapatkan realisasi 92.39% dan capaian kinerja sebesar 92.39% pada tahun 2025.
2. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal dengan target 100 Nilai mendapatkan realisasi 100 Nilai dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT dengan target 80 Angka mendapatkan realisasi 70 Angka dan capaian kinerja sebesar 87.5 % pada tahun 2025.
7. Nilai pendapatan UPT dengan target 100.000.000 mendapatkan realisasi 154.448.000 dan capaian kinerja sebesar 110% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 11 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- c. Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan realisasi 79.67 % dan capaian 79.67 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami kenaikan 13 %, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 89 % dan capaian 89% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan 3%.
- d. Persentase aset yang tercatat mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 99 % dan capaian 99% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan 1%.
- e. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- f. Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- g. Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024

mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- h. Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- i. Predikat SAKIP merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- j. Tingkat Maturitas SPIP merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- k. Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase kegiatan tepat waktu merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

- g. Nilai pendapatan UPT merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran dengan melakukan rapat monitoring secara triwulanan
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti penyusunan rencana kerja tahun 2025, renstra tahun 2025-2029, RKA dan DPA tahun 2025, perubahan RKA dan DPA tahun 2025, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan evaluasi kinerja, pengumpulan data perhubungan, walidata, laporan keuangan, pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah dan lainnya
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek SAKIP, PBJ, Laporan Keuangan, ANJAB dan ABK, Manajemen ASN dan lain lain.
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian seperti dokumen-dokumen surat penanggung jawaban yang lengkap, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, penginputan dan rekon keuangan yang tepat waktu, ketertiban pegawai.
- Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran seperti pemeliharaan Gedung kantor Zafri Zam-Zam, Gedung Kantor Banjarbaru, pembelian komputer, ATK, printer, pakaian dinas serta atribut, pembayaran pajak kendaraan, mabel dan lainnya.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal, Seringnya aplikasi SIPD yang maintenance dan kualitas data kinerja belum konsisten (terlambat).

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Perhubungan se Kalimantan Selatan
- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026
- Menyusun Dokumen Rancangan Peraturan Perhubungan Daerah
- Menyusun DPA dan RKA TA 2026 dengan koordinasi dan konsultasi ke BAPPEDA, BPKAD dan inspektorat.
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ke Kementrian Perhubungan
- Melaksanakan survei masyarakat ke kab/kota.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Melakukan pemeliharaan gedung kantor Banjarbaru dan Beangarmasin.
- Pembelian ATK, pemadam kebakaran, mesin tempel kapal, CCTV dan lainnya.
- Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
- Meningkatkan pencatatan asset dan monitoring aset ke kab/kota, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)
-

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 22
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Renstra 2021-2026 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, perubahan RKA dan perubahan DPA tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 - Kegiatan dalam rangka penyusunan integrasi, Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kinerja Ke Dishub Kab/Kota atau instansi terkait - Kegiatan Rapat Penyusunan LKPJ, LAKIP dan Evaluasi Monitoring Kinerja - Survei Kepuasan Masyarakat	1. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan 2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas pemerintah daerah 3. Menetapkan prioritas pembangunan perhubungan 4. Mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran 6. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja 7. Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan perhubungan
2	Renstra 2021-2026 Pelayanan Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan kinerja 2. Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

	Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	- Kegiatan Rapat Penyusunan LKPJ, LAKIP dan Evaluasi Monitoring Kinerja 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kegiatan Inventarisasi Aset Dinas Perhubungan yang ada di Pemprov. Kalsel - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Inventarisasi Aset Milik Dishub Prov Kalsel 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Menjamin tertib administrasi dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) 4. Mendukung keakuratan dan kelengkapan data asset 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan asset 6. Memperkuat sinergi antar unit kerja 7. Mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah
3	Renstra 2021-2026 Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Menjamin kelancaran administrasi dan operasional perangkat daerah 2. Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan 3. Menjamin ketersediaan layanan penunjang operasional 4. Menjaga kondisi dan fungsi Barang Milik Daerah 5. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset dan anggaran

	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah
4	Renstra 2021-2026 Peningkatan kualitas SDM OPD Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

	Dinas Perhubungan		
5	Renstra 2021-2026 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal PD Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, perubahan RKA dan perubahan DPA tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 - Kegiatan dalam rangka penyusunan integrasi, Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kinerja Ke Dishub Kab/Kota atau instansi terkait - Kegiatan Rapat Penyusunan LKPJ, LAKIP dan Evaluasi Monitoring Kinerja	1. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan 2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas pemerintah daerah 3. Menetapkan prioritas pembangunan perhubungan 4. Mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran 6. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja 7. Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan perhubungan 7. Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan perhubungan
6	Renstra 2021-2026 Meningkatnya Maturitas SPIP Internal Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, perubahan RKA dan perubahan DPA tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025	1. Memperkuat penetapan tujuan dan perencanaan berbasis risiko 2. Meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian keuangan 3. Memperbaiki koordinasi, komunikasi, dan tata kelola aset 4. Mendukung penerapan SPIP secara efektif dan berkelanjutan

	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	- Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya	
7	Renstra 2021-2026 Meningkatnya kualitas pelayanan Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Survei pegawai di Dinas Perhubungan	1. Mengukur tingkat kepuasan dan persepsi pegawai 2. Mengidentifikasi permasalahan internal secara dini

1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 23
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100

7	Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Laporan	17 Laporan	100
8	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	1 Data	1 Data	100
9	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 Orang/Bulan	83 Orang/Bulan	100
11	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100
12	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
13	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100
14	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia pada tahun 2024
- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang tersusun
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tahun 2024
- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang terusun tahun 2024
- Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN yaitu Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah ASN yang menjalankan tugas
- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu jumlah dokumen hasil penyediaan adiministrasi pelaksanaan tugas ASN yang terusun di tahun 2024
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terususun di tahun 2024

- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun tahun 2024
- Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah yang tersedia pada tahun 2025
- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah yang tersedia pada tahun 2025
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun 2025

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 24

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Buah	4 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	4 Dokum en	4 Dokumen	100
2	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Buah	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100
3	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-	1 Buah	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100

	SKPD							
4	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Buah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100
7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Buah	4 Dokumen	17 Dokumen	4 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100
8	Jumlah orang yang menerima	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	83 Orang/Bulan	83 Orang/Bulan	100

	gaji dan tunjangan ASN							
9	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	21 Orang	11 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
10	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
11	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100
12	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	-	1 Data	1 Data	100
13	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	statistik sektoral daerah							
14	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 25
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	% Capaian (6)
1	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100%
3	Meningkatnya tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

$$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang tergetkan untuk disusun dalam satu tahun}} \times 100\%$$

- Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun

$$\frac{\text{Jumlah relisasi Laporan keuangan yang disusun}}{\text{Jumlah laporan keuangan yang ditargetkan untuk disusun dalam satu tahun}} \times 100\%$$

- Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang ditergetkan untuk disusun dalam satu tahun}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 26
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Renstra 2021-2026 memiliki sasaran strategis yaitu :

Sasaran strategis Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 6 Laporan dan realisasi 6 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 17 Laporan dan realisasi 17 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah dengan target 1 Data dan realisasi 1 Data sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah dengan target 1 Dokumen dan

realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 83 Orang/Bulan dan realisasi 83 Orang/Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 6 Laporan dan realisasi 6 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD pada SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 6 Laporan dan realisasi 6 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Renstra 2025-2029 memiliki sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan realisasi 100% Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- b. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Laporan

Keuangan Yang Disusun dengan target 100% dan realisasi 100% Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

- c. Meningkatnya tertib Administrasi Barang Milik Daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 14 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- c. Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- d. Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- e. Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan

capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- f. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- g. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- h. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- i. Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- j. Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- k. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- l. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- m. Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- n. Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Kegiatan Penyusunan RKA, DPA, perubahan RKA dan perubahan DPA tahun 2025
- Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025

- Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
- Kegiatan dalam rangka penyusunan integrasi, Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kinerja Ke Dishub Kab/Kota atau instansi terkait
- Kegiatan Rapat Penyusunan LKPJ, LAKIP dan Evaluasi Monitoring Kinerja
- Survei Kepuasan Masyarakat Hambatan dalam pencapaian kinerja;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Inventarisasi Aset Dinas Perhubungan yang ada di Pemprov. Kalsel
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Inventarisasi Aset Milik Dishub Prov Kalsel

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal, Seringnya aplikasi SIPD yang maintenance dan kualitas data kinerja belum konsisten (terlambat).

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Perhubungan se Kalimantan Selatan
- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026
- Menyusun Dokumen Rancangan Peraturan Perhubungan Daerah
- Menyusun DPA dan RKA TA 2026 dengan koordinasi dan konsultasi ke BAPPEDA, BPKAD dan inspektorat.
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ke Kementrian Perhubungan
- Melaksanakan survei masyarakat ke kab/kota.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan

- Meningkatkan pencatatan aset dan monitoring aset ke kab/kota, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 27
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Rencana Kerja Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025 - Kegiatan Rapat Rencana Strategis Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 - Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka singkronisasi rencana strategis ke dishub kab/kota	1. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan 2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas pemerintah daerah 3. Menetapkan prioritas pembangunan perhubungan 4. Mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran 6. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja 7. Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan perhubungan

		- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinkronisasi Rencana Kerja ke dishub kab/kota	
2	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan RKA tahun 2025 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan RKA	1. Menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran kesesuaian dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan substansi RKA 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan perubahan RKA tahun 2025 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan perubahan RKA	1. Menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran kesesuaian dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan substansi perubahan RKA 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
4	RENSTRA 2021-2026	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran

	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan perubahan RKA tahun 2025 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan DPA	kesesuaian dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan substansi DPA 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
5	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Penyusunan perubahan RKA tahun 2025 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ke instansi terkait (BAPPEDA,BPKAD, inspektorat dan lainnya) untuk penyusunan perubahan DPA	1. Menjamin keselarasan perencanaan dan penganggaran kesesuaian dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan substansi perubahan DPA 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
6	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Menyamakan pemahaman terhadap indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja SKPD sehingga laporan yang disusun akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memastikan kelengkapan dan ketepatan data kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD.

	RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	- Kegiatan Koordinasi dalam Rangka Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 4. Mendukung ketepatan waktu penyelesaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
7	RENSTRA 2021-2026 Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Penyusunan LKPJ - Kegiatan Rapat Penyusunan Pengumpulan dan Penyusunan Data LAKIP - Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 - Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan/program	1. Menjamin akurasi, keterpaduan, dan akuntabilitas data kinerja 2. Mendukung evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 3. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan kelancaran proses pelaporan kinerja
8	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan pengumpulan data sektoral daerah perhubungan - Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengumpulan data perhubungan ke dishub kab/kota	1. Menjamin ketersediaan dan keakuratan data sektoral perhubungan 2. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan data antar wilayah 3. Mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor perhubungan

	perangkat daerah yang disusun		
9	RENSTRA 2021-2026 Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral daerah RENSTRA 2025-2029 Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah sektoral daerah perhubungan - Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah perhubungan	1. Menjamin ketersediaan, kualitas, dan keandalan data statistik sektoral perhubungan 2. Mewujudkan keterpaduan dan keseragaman data antar produsen data 3. Mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
10	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. menjamin kesejahteraan, motivasi, dan stabilitas kinerja aparatur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
11	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Mendukung kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur sehingga kinerja organisasi dapat berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

	RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun		
12	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Evaluasi Keuangan/SPJ - Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan - Kegiatan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan dan Menghadiri rapat koordinasi penyelesaian hasil pemeriksaan evaluasi keuangan	1. Menjamin ketertiban, keakuratan, dan kepatuhan pengelolaan keuangan 2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah
13	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Dalam Rangka Pengawasan dan Pengamanan Aset Milik Dishub Prov. Kalsel	1. Menjamin tertib administrasi, mencegah kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta menjaga keberlangsungan pemanfaatan aset dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

14	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Rapat Inventarisasi Ase - Kegiatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi serta Inventarisasi Aset Milik Dishub Prov Kalsel	1. Menjamin keakuratan dan keteraturan data aset 2. Mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset

2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 28

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 Orang	24 Orang	100

3	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100
4	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100
5	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	83.3
6	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100
7	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100
8	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100
9	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
10	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100

11	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100
12	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
13	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
14	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100
15	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100
Rata-Rata Capaian					99 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia pada tahun 2025
- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor pada tahun 2025

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2025
- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah Cetak dan Penggandaan pada tahun 2025
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan pada tahun 2025
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Jumlah website yang dioperasikan dan dikembangkan pada tahun 2025
- Jumlah paket mebel yang disediakan yaitu Jumlah mebel yang disediakan
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah bangunan kantor yang terbayarkan sumber daya air dan listrik pada tahun 2025
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara pada tahun 2025
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 29

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	115 setel	115 Paket	83 Paket	2 Paket	2 Paket	100
2	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	12 Bulan	14 Orang	10 Orang	24 Orang	24 Orang	100
3	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Buah	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	100
4	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1104 Buah	12 Bulan	25 paket	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100
5	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 unit / tahun	12 Bulan	11 Paket	6 Paket	4 Paket	3 Paket	83.3
6	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	85658 Buah	12 Bulan	12 paket	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100

7	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7817 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
8	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	88 orang	12 Bulan	12 Laporan	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100
9	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
10	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Dokumen	12 Bulan	1 Paket	5 Paket	4 Paket	4 Paket	100
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Bulan	13 Unit	39 Unit	14 Unit	14 Unit	100
12	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100

	Kantor yang Disediakan							
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Buah	12 Bulan	29 Unit	34 Unit	9 Unit	9 Unit	100
15	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Buah	12 Bulan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100
Rata-Rata Capaian								99 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 30

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	96.42 %	96.42 %
Rata-Rata Capaian					99 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

$$\frac{\text{Jumlah relaisasi Barang yang wajib dipelihara}}{\text{jumlah Barang yang ditargetkan untuk dipelihara dalam satu tahun}} \times 100\%$$

- Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Laporan Pelayanan yang disusun}}{\text{Jumlah Laporan Pelayanan yang ditargetkan dalam satu tahun}} \times 100\%$$

- Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM

$$\frac{\text{Jumlah relisasi SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah SDM yang ditargetkan mengikuti pelatihan dalam setahun}} \times 100\%$$

- Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Barang yang disediakan}}{\text{Jumlah kebutuhan barang dalam satu tahun}} \times 100\%$$

- Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Laporan Administrasi umum yang telah disusun}}{\text{Jumlah Laporan Administrasi umum yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 31

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	96.42%	96.42%
RATA-RATA CAPAIAN					99 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Renstra 2021-2026 memiliki sasaran strategis yaitu :

- Sasaran Strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 2 paket dan realisasi 2 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- Sasaran strategis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

dengan target 24 Orang dan realisasi 24 Orang sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

- c. Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 4 paket dan realisasi 4 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- d. Sasaran strategis Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 4 paket dan realisasi 4 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- e. Sasaran strategis Tersedianya bahan logistik kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan 4 paket dan realisasi 3 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 83.3% pada tahun 2025.
- f. Sasaran strategis Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target
- g. Sasaran strategis Tersedianya bahan 4 paket dan realisasi 4 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- h. Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 18 Laporan dan realisasi 18 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- i. Sasaran strategis Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

- j. Sasaran strategis Tersedianya Mebel dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 4 paket dan realisasi 4 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- k. Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 14 Unit dan realisasi 14 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- l. Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- m. Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- n. Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 9 Unit dan realisasi 9 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- o. Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit dan realisasi 2 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Renstra 2025-2025 memiliki sasaran strategis yaitu :

- a. Sasaran Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

- b. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- c. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- d. Sasaran Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- e. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 96.42 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 96.42 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 15 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- c. Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024

dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- d. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- e. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan 17%, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan 17%.
- f. Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- g. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- h. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- i. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada

tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- j. Jumlah paket mebel yang disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- k. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- l. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- m. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- n. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- o. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 %

pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Pengadaan Pakaian Dinas ASN PDH dan sasirangan
- Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi seperti SAKIP, PBJ, Manajemen risiko, laporan keuangan dan lainnya.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor, dan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan di kantor Zafri Zam-zam Banjarmasin dan Banjarbaru
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketepatan waktu pegawai ke Kominfo
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ke BKD tentang mutasi, pension, cuti dan lainnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembinaan pegawai
- Melakukan kegiatan posko nataru dan lebaran idul fitri.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Jumlah pegawai belum memiliki kompetensi memadai dapat mempengaruhi kelancaran administrasi kepegawaian dan umum. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti peralatan kantor, sistem administrasi digital, atau kendaraan dinas, dapat memperlambat proses administrasi dan pelayanan. Koordinasi dengan berbagai pihak (Kominfo, BKD, internal SKPD) memerlukan waktu dan kadang menghadapi kendala teknis atau administratif, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan dan pelaksanaan tugas pegawai.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pembinaan pegawai.
- Melakukan pemeliharaan gedung kantor Banjarbaru dan Beanjarmasin.
- Pembelian ATK, pemadam kebakaran, mesin tempel kapal, CCTV dan lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan seperti diklat PBJ, laporan keuangan, SAKIP, perhubungan dan lainnya.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 32
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya pakaian dinas beserta atribut	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Menunjang penampilan, disiplin, dan identitas pegawai, serta mendukung

	kelengkapan RENSTRA 2025-2029 Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas PDH dan sasirangan	kelancaran pelaksanaan tugas dan representasi resmi organisasi.
2	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi RENSTRA 2025-2029 Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Pelatihan dan Bimtek untuk pegawai	1. Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi, sehingga kinerja pegawai lebih efektif, profesional, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Meningkatkan kelancaran operasional kantor, keselamatan pegawai, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan organisasi.
4	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RENSTRA 2025-2029	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Komputer, ATK, kertas cover dan lainnya)	1. Mendukung kelancaran administrasi, efektivitas kerja pegawai, serta terselenggaranya pelayanan dan tugas kantor secara optimal.

	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya bahan logistik kantor RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor (BBM Kapal Pembersih Alur Sungai Dan Pangeran Samudra, BBM Speedboat, BBM BRT dan lainnya)	1. Kelancaran operasional sarana transportasi dan pelaksanaan tugas dinas di lapangan secara efektif dan tepat waktu.
6	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan pengadaan RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan (Bahan Cetak Buku Laporan Tahunan, Stiker dan lainnya)	1. Mendukung dokumentasi, publikasi, dan penyebaran informasi organisasi secara profesional dan tepat waktu.
7	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan penyediaan Majalah Tempo dan Surat Kabar/Majalah	1. Mendukung akses informasi, pengetahuan, dan referensi terkini bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang tepat.
8	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program

	konsultasi SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kegiatan Rapat Sipencatar, Pelatihan Awak Pengemudi BRT, Program Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan lainnya - Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ke kab/kota, dinas terkait, kementerian dan lainnya	berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran.
9	RENSTRA 2021-2026 Terlaksanya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD RENSTRA 2025-2029 Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Hosting domain web dan pemeliharaan aplikasi web)	1. Memastikan kelancaran layanan digital, keamanan data, dan efektivitas operasional SKPD dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi.
10	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Mebel RENSTRA 2025-2029 Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan penyediaan mebel (meja, kursi dan lemari arsip)	1. Mendukung kenyamanan, tertib administrasi, dan efisiensi ruang kerja sehingga pelaksanaan tugas pegawai dapat berlangsung optimal.
11	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya RENSTRA 2025-2029 Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - kegiatan peralatan dan mesin (kamera digital, ups, laptop, computer, printer, printer scanner)	- Mendukung kelancaran administrasi, dokumentasi, serta efektivitas dan produktivitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

12	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RENSTRA 2025-2029 Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik (internet, Listrik, pdam, langganan aplikasi rapat)	1. Menjamin kelancaran operasional kantor, mendukung komunikasi internal dan eksternal, serta efektivitas pelaksanaan tugas pegawai.
13	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor RENSTRA 2025-2029 Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (alat bersih kantor, spanduk dan makan minum untuk posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru, stand untuk expo kalsel)	1. Mendukung kelancaran operasional, kenyamanan lingkungan kerja, serta terselenggaranya kegiatan dan pelayanan publik secara efektif.
14	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan RENSTRA 2025-2029 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (pemeliharaan doking kapal, kendaraan dinas roda 4, 2, 6, Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Operasional Kantor, Kapal	1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran operasional, dan ketersediaan sarana transportasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dinas secara optimal.

		Pangeran Samudra dan Speedboat)	
15	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya RENSTRA 2025-2029 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Kantor Banjarmasin dan Banjarbaru	1. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran operasional kantor, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan organisasi.

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 33

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0%	0 %	100
		Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	75%	75 %	100
		Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran	0,276	0,276	100
		Persentase lintas penyeberangan dan kapal	60 %	75 %	110

		angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi			
		Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	100 %	100 %	100
		Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam provinsi yang beroperasi	60 %	75 %	110
		Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani	100 %	100 %	100
		Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar	25,64 %	28.57 %	110

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar

$$PP(p) = \frac{\sum PPs}{\sum PPr} \times 100 \%$$

PP(p) = Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standard.

PPs = Jumlah alur pelabuhan yang dipelihara.

PPr = Jumlah alur pelabuhan yang terdaftar.

- Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)

$$KPf(p) = \frac{\sum KPf}{\sum KPr} \times 100 \%$$

KPf(p) = Persentase kecelakaan angkutan perairan dengan fata

KPf = Jumlah kecelakaan angkutan perairan dengan fatalita

KPr = Jumlah kecelakaan angkutan perairan yang tercatat

- Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan

$$OTP(p) = \frac{\sum LP1}{\sum LPr} \times 100 \%$$

OTP(p) = Presentase on time performance (OTP) trayek lintas pera

LP1 = Jumlah lintas perairan dengan nilai OTP 1.

LPr = Jumlah lintas perairan yang beroperasi.

- Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran

IK2 (Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan) = (Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut X Bobot Lintas) Dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut)

- Persentase lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi

Jumlah alur pelabuhan sungai yang terpelihara dibagi jumlah alur pelabuhan yang ada x 100 %

- Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi

$$PR(p) = \sum PRs / \sum PRr \times 100 \%$$

PR(p) = Persentase jumlah badan usaha pelayaran rakyat yang beroperasi sesuai standard/ketentuan.

PRs = Jumlah badan usaha pelayaran rakyat yang beroperasi sesuai standard/ketentuan.

PRr = Jumlah badan usaha yang terdaftar.

- Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam provinsi yang beroperasi

Jumlah alur pelabuhan sungai yang terpelihara dibagi jumlah alur pelabuhan yang ada x 100 %

- Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani

$$JT(p) = \sum JTs / \sum JTr \times 100 \%$$

JT(p) = Persentase jumlah badan usaha pelayaran rakyat yang beroperasi sesuai standard/ketentuan.

JTs = Jumlah badan usaha jasa terkait yang beroperasi sesuai standard/ketentuan.

JTr = Jumlah badan usaha jasa terkait yang terdaftar.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 34

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	17.9 %	67,03%	23,07%	22,86 %	25,64 %	28.57 %	110
2	Persentase lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi	-	-	-	-	60 %	75 %	110
3	Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	-	-	-	-	100 %	100 %	100
4	Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam	-	-	-	-	60 %	75 %	110

	provinsi yang beroperasi							
5	Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani	-	-	-	-	100 %	100 %	100
6	Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0 %	0%	0%	100 %	0%	0 %	100
7	Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	100 %	66%	66%	75 %	75%	75 %	100
8	Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran	-	-	-	0,27	0,276	0,276	100
Rata-Rata Capaian								104%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 35
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air	0.62 Rasio	0.62	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Rasio Konektivitas Air

RK_{TSDP} = Rasio Konektivitas transportasi Sungai, danau, dan penyeberangan

Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani angkutan penyeberangan

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Eksisting dan Rencana Pelabuhan Penyeberangan dalam RIPN

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 36
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas Air	0.62	0.62 Rasio	0.62	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan mendapatkan rata-rata capaian sebesar 104% dan memiliki 8 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar dengan target 25,64 % dan realisasi 28.57 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.
2. Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) dengan target 0% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2025.
3. Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan dengan target 75% dan realisasi 75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.
4. Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran dengan target 0.276% dan realisasi 0.276% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.
5. Persentase lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi dengan target 60 % dan realisasi 75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.
6. Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi dengan

target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

7. Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam provinsi yang beroperasi dengan target 60 % dan realisasi 75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.
8. Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan mendapatkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas Air dengan target 0.62 Rasio dan realisasi 0.62 Rasio sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 8 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) mendapatkan realisasi 0 dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian karena ini kinerja capaian negatif, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 0 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan mendapatkan realisasi 75% dan capaian 75 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 77 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan 2%.
- c. Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran mendapatkan realisasi 0.27 dan capaian 98,54 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 ada kenaikan 0.006, indikator ini baru ada di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- d. Persentase lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota dan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi merupakan indikator

kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

- e. Persentase izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Persentase data lintas penyeberangan dan kapal angkutan penyeberangan antar kota/kab dalam provinsi yang beroperasi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- g. Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang dilayani merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- h. Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar mendapatkan realisasi 22,86 % dan capaian 88,91 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 94% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas Air merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi di kab/kota seperti di PT. JPT Adit Jaya Mandiri di Kabupaten Tabalong
- Melaksanakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pembersihan Alur Sungai Luang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sungai Danau Panggang menuju Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sungai Martapura Dermaga Pemko sampai dermaga Sungai lauk.
- Melaksanakan Evaluasi Dan Survei Data Lintas Penyeberangan Di Kabupaten Barito Kuala Dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Melaksanakan Pendataan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Ke Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Melaksanakan survei ketepatan waktu tempuh trayek lintas perairan
- Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat ke kabupaten kotabaru, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ke Kementerian Perhubungan.
- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Dermaga Pasar Lima, Pasar Baru, Dermaga Martapura Baru, Sungai Barito Dermaga Mantuil Banjarmasin
- Melaksanakan Pengawasan dan pengamanan Sungai Martapura acara Haul Guru Sekumpul.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan faktor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan, SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkau dan rusak, perlatan pembersih alur yang sulit di temukan untuk sesuai di lapangan dan semakin menurunnya minat Masyarakat untuk menaiki kapal angkut karena banyaknya sudah dibangun jalan dan jembatan penghubung.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan rapat Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Melaksanakan Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Sungai
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ke Kementrian Perhubungan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Melaksanakan Pekerjaan alur sungai danau panggang menuju sungai Paminggir
- Melaksanakan Pekerjaan Pembersihan Alur Sungai Dalam kecamatan babirik Kab. Hulu Sungai Utara
- Melaksanakan sosialisasi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

- Mengoptimalkan pemanfaatan media online (website dishub, wa dan IG) untuk pemenuhan perolehan izin usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat dan koordinasi dengan instansi terkait (Otoritas Pelabuhan).
- Melaksanakan kolaborasi dan Kerjasama dengan Polairut Polda Kalsel, Dishub Kab/Kota dan relawan untuk kegiatan pengamanan kapal pengangkut penumpang atau barang.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 37
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan RENSTRA 2025-2029 Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - Kegiatan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait 2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah	1. Menjamin kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan usaha transportasi perairan 2. Meningkatkan pengawasan, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi perairan 3. Mendukung kelancaran konektivitas dan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 4. Mewujudkan keterpaduan data dan koordinasi lintas pemerintah daerah

		Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional - Kegiatan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Kegiatan sosialisasi penyelamatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau - Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang 4. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah	

		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data jaringan Dishub Kab/Kota	

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 38

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	100
2	Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100
Rata-Rata Capaian					100 %

Rumus Perhitungan :

- Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan yaitu Jumlah alur pelabuhan sungai yang terpelihara.
- Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yaitu Jumlah laporan pengawasan yang dibuat.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 39

**Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	-	14 Kab/kota	8 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100
2	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas	13 Buah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100

	daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi							
	Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 40

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kelancaran pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	25.64 %	25.64 %	100
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai yang ditetapkan sesuai RIPN}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 41

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	25.64 %	25.64 %	25.64 %	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan RENSTRA 2025-2029

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan mendapatkan realisasi 9 unit target 9 unit capaian sebesar 100% pada tahun 2025. Sasaran strategis Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan indikator kinerja Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi mendapatkan realisasi 4 Laporan target 4 Laporan capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya kelancaran pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar mendapatkan realisasi 25.64 % target 25.64 % capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan mendapatkan realisasi 9 Unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi mendapatkan realisasi 4 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pembersihan Alur Sungai Luang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sungai Danau Panggang menuju Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sungai Martapura Dermaga Pemko sampai dermaga Sungai lauk.
- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Dermaga Pasar Lima, Pasar Baru, Dermaga Martapura Baru, Sungai Barito Dermaga Mantuil Banjarmasin
- Melaksanakan Pengawasan dan pengamanan Sungai Martapura acara Haul Guru Sekumpul.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan faktor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan, SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkau dan rusak, perlatan pembersih alur yang sulit di temukan untuk sesuai di lapangan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan rapat Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Melaksanakan Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Sungai
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ke Kementerian Perhubungan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Melaksanakan Pekerjaan alur sungai danau panggang menuju sungai Paminggir
- Melaksanakan Pekerjaan Pembersihan Alur Sungai Dalam kecamatan babirik Kab. Hulu Sungai Utara
- Melaksanakan sosialisasi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- Melaksanakan kolaborasi dan Kerjasama dengan Polairut Polda Kalsel, Dishub Kab/Kota dan relawan untuk kegiatan pengamanan kapal pengangkut penumpang atau barang.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 42
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi RENSTRA 2025-2029	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan sosialisasi penyelamatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Meningkatkan pengawasan, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi perairan 2. Mendukung kelancaran konektivitas dan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	- Kegiatan Pembersihan Alur Sungai Danau Panggang Menuju Sungai Paminggir, Sungai Luang Kecamatan Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Sungai Buluh, Dan Sungai Sambujur Menuju Sungai Danau Panggang	
	RENSTRA 2021-2026 1. Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi RENSTRA 2025-2029 Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1. Meningkatkan pengawasan, keselamatan, dan kualitas pelayanan transportasi perairan 2. Mendukung kelancaran konektivitas dan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

2) Eselon IV (Kepala Seksi Prasarana Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 43

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian	10 Dokumen	10 Dokumen	100

Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi			
Rata-Rata Capaian				100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 44

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100

	dalam daerah provinsi							
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 45

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya Data Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	60 %	60 %	100
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

$$\frac{\text{Jumlah Data Jaringan Lintas yang Tersedia}}{\text{Jumlah data Jaringan Lintas yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 46

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	60 %	60 %	60 %	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi mendapatkan realisasi 10 Dokumen target 10 Dokumen capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Tersedianya Data Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi mendapatkan realisasi 60 % target 60 % capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi mendapatkan

realisasi 5 Dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian realisasi mengalami kenaikan 5 dokumen, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian untuk realisasi mengalami kenaikan 5 dokumen.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan Evaluasi Dan Survei Data Lintas Penyeberangan Di Kabupaten Barito Kuala Dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Melaksanakan Pendataan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Ke Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Melaksanakan survei ketepatan waktu tempuh trayek lintas perairan

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkau dan rusak, dan semakin menurunnya minat Masyarakat untuk menaiki kapal angkut karena banyaknya sudah dibangun jalan dan jembatan penghubung.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data jaringan Dishub Kab/Kota

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 47
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi RENSTRA 2025-2029 Tersedianya Data Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data jaringan Dishub Kab/Kota	1. Menjamin kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan usaha transportasi perairan 2. Mewujudkan keterpaduan data dan koordinasi lintas pemerintah daerah

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 48
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	15 Dokumen	100
2	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	10 Unit	10 Unit	100
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi
- Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu

$$JT(d) = f, fTs$$

JT(d) Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan izin usaha jasa terkait.

f, fTs Penjumlahan dokumen pemenuhan persyaratan tiap – tiap badan usaha jasa terkait.

- Jumlah angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan yaitu

$$PR(p) = PRs$$

PR(u) = Jumlah unit angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi.

PRs Penjumlahan tiap — tiap unit badan usaha angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 49

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa	15 Reko mendasi	15 Reko mendasi	5 Doku men	19 Doku men	15 Doku men	15 Doku men	100

	Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	-	2 Rekomendasi	20 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 50

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi	100 %	100 %	100 %

	Kalimantan Selatan diterbitkan	Kalimantan Selatan diterbitkan			
2.	Meningkatnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi izin (Perpanjang + Baru) penyelenggaraan Angkutan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam 1 provinsi yang di terbitkan}}{\text{Jumlah penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam 1 provinsi yang di tetapkan}} \times 100\%$$

- Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi izin (diperpanjang + Baru) yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin yang ditetapkan (diperpanjang + Baru)}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 51

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendapatkan realisasi 15 Dokumen target 15 Dokumen capaian

sebesar 100% pada tahun 2025. Sasaran strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik indikator kinerja Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan mendapatkan realisasi 10 Unit target 10 Unit capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan mendapatkan realisasi 100 % target 100 % capaian sebesar 100% pada tahun 2025. Sasaran strategis Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan mendapatkan realisasi 100 % target 100 % capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mendapatkan realisasi 19 Dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian realisasi mengalami penurunan 4 dokumen, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan

dalam capaian. Indikator Kinerja yaitu Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan mendapatkan realisasi 2 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan dan Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi di kab/kota seperti di PT. JPT Adit Jaya Mandiri di Kabupaten Tabalong
- Melaksanakan Pendataan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Ke Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Melaksanakan survei ketepatan waktu tempuh trayek lintas perairan
- Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat ke kabupaten kotabaru, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ke Kementerian Perhubungan.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan faktor alam serta factor teknis lainnya seperti SDM di lapangan, jarak yang jauh untuk di jangkau dan rusak dan semakin menurunnya minat Masyarakat untuk menaiki kapal angkut karena banyaknya sudah dibangun jalan dan jembatan penghubung.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengoptimalkan pemanfaatan media online (website dishub, wa dan IG) untuk pemenuhan perolehan izin usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat dan koordinasi dengan instansi terkait (Otoritas Pelabuhan).
- Kegiatan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 52
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik RENSTRA 2025-2029 Meningkatnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - Kegiatan monitoring dan evaluasi usaha jasa pengurusan transportasi - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait	1. Menjamin kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan usaha transportasi perairan 2. Mendukung kelancaran konektivitas dan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 3. Mewujudkan keterpaduan data dan koordinasi lintas pemerintah daerah

	Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan		
2	RENSTRA 2021-2026 Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik RENSTRA 2025-2029 Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Program Pengelolaan Pelayaran 1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional - Kegiatan monitoring, koordinasi dan sinkronisasi Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1. Menjamin kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan usaha transportasi perairan 2. Mendukung kelancaran konektivitas dan operasional transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 3. Mewujudkan keterpaduan data dan koordinasi lintas pemerintah daerah

5. Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 53

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel	Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	75 %	50 %	66.67
		Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	78.79 %	78.79 %	100
		Persentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi	20 %	50 %	110
		Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100 %	50 %	50
		Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum	0.373 Rasio	0.373 Rasio	100
2	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	80%	60 %	75
RATA-RATA CAPAIAN					83,61

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP

$$\text{Target Persentase Terangkutnya Penumpang} = P.AU0 + P.AU1$$

P.AU0 = Persentase pengguna angkutan umum pada tahun dasar

P.AU1 = Peningkatan persentase pengguna angkutan umum yang direncanakan

- Persentase terangkutnya barang yaitu Persentase terpenuhinya kebutuhan angkutan barang
- Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu

$$100\% - \frac{(WTeks - WTSPM)}{WTSPM}$$

WTeks = Waktu tempuh eksisting

WTSPM = Waktu tempuh sesuai SPM

- Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu Jumlah angkutan umum yang
- Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia yaitu Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia Kepala Bidang Angkutan Jalan Kasi Pemaduan Moda dan Pengembangan tahun 2025
- Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi yaitu Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Tidak Dalam Trayek Dalam Provinsi yang tersedia tahun 2025
- Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yaitu Jumlah dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang tersedia tahun 2025
- Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum yaitu IK1 (Angkutan Jalan) = Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi / Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Provinsi Tersebut $\times$ Bobot Trayek

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 54

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	65 %	30.661 Orang	15%	20%	75 %	50 %	66.67

2	Persentase terangkutnya barang	65%	100%	100%	100%			
3	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	-	35%	45%	70%	80%	60 %	75
4	Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	-	-	-	-	78.79 %	78.79 %	100
5	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi	-	-	-	-	20 %	50 %	110
6	Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	-	-	-	-	100 %	50 %	50
7	Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum	-	-	-	-	0.373 Rasio	0.373 Rasio	100
Rata-Rata Capaian								83.61

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 55
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait angkutan jalan	Rasio Konektivitas Darat	0.63 Rasio	0.69	110
2	Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretapihan	Persentase Pemenuhan Kebijakan	100 %	0	0

di	kewenangan	Penetapan Jaringan			
Provinsi		Perkeretaapian			
RATA-RATA CAPAIAN					55 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Rasio Konektivitas darat

RK_{AP} = Rasio konektivitas angkutan perkotaan

$$\frac{\text{Jumlah kawasan perkotaan yang telah dioperasikan angkutan massal}}{\text{Jumlah kawasan perkotaan dalam RTRW}}$$

$RK_{AKAP/AKDP}$ = Rasio konektivitas angkutan antarkota dalam provinsi dan angkutan lintas batas negara dengan Terminal Tipe B /ALBN

$$\frac{\text{Jumlah terminal tipe B yang telah dioperasikan}}{\text{Jumlah lokasi terminal AKAP atau ALBN sesuai Keputusan Menteri}}$$

RK_{TJ} = Rasio Konektivitas Transportasi Jalan / Rasio Konektivitas Darat

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Rasio konektivitas angkutan perkotaan +} \\ \text{Rasio konektivitas angkutan antarkota dalam provinsi} \\ \text{dan angkutan lintas batas negara dengan Terminal Tipe B /ALBN} \end{array}}{2}$$

- Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yaitu Jumlah dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang tersedia

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 56
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas Darat	0.69	0.63 Rasio	0.69	110
2	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	0	100 %	0	0
RATA-RATA CAPAIAN					55 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel mendapatkan rata-rata capaian sebesar 85% dan memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang dengan target 75 % dan realisasi 50 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 66.67% pada tahun 2025.
2. Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dengan target 78.79 % dan realisasi 78.79 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.
3. Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi dengan target 20 % dan realisasi 50 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.
4. Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian dengan target 100% dan realisasi 50% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 50% pada tahun 2025.
5. Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum dengan target 0.373 Rasio dan realisasi 0.373 Rasio sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan dengan indikator Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum dengan target 80 % dan realisasi 60 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 75 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait angkutan jalan Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas Darat dengan target 0.63 Rasio dan realisasi 0.69 Rasio sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Tersedianya Kebijakan Jaringan Perk eretapian di kewenangan Provinsi Indikator KinerjaPersentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian dengan target 100% dan realisasi 0 sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 6 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang mendapatkan realisasi 60 dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian mengalami penurunan, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan.
- b. Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek Dalam Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Presentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Indeks Konektivitas Trayek Angkutan Umum merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum mendapatkan realisasi 70 dan capaian 87.5 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 dalam realisasi dan capaian mengalami penurunan, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 mengalami penurunan.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas Darat merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Untuk memenuhi tingkat keberhasilan pemerintah provinsi dalam menetapkan jaringan trayek angkutan umum sesuai dengan rencana dan kebutuhan pelayanan transportasi di wilayahnya. Penetapan jaringan trayek mencakup proses penetapan lintasan, rute, dan jenis layanan angkutan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan administrasi di provinsi
- Untuk memenuhi tingkat keberhasilan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan, dengan memberikan fasilitasi dan pengawasan yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan angkutan umum agar berjalan tertib, teratur, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah provinsi.
- Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa angkutan dan operator penyedia layanan terhadap penetapan serta penerapan tarif kelas ekonomi pada layanan angkutan orang, baik antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, maupun angkutan perdesaan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna, operator dan stakeholder terkait lainnya.
- Untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta fasilitas terminal yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Aspek pelayanan meliputi kenyamanan, ketepatan waktu, kemudahan akses, dan kualitas sarana-prasarana, aspek keselamatan mencakup kepatuhan terhadap standar teknis kendaraan, kelaikan jalan, serta kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan. Upaya dan usaha yang dilakukan kepada operator diantaranya melakukan pembinaan dan sosialisasi; penilaian dan audit keselamatan; peningkatan kompetensi SDM; pengawasan dan penegakan aturan; pemanfaatan teknologi; budaya keselamatan (safety culture); sinergi pemerintah dan stakeholder.
- Melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana jasa konsultansi PT Mahatma Jaya Mulya terkait pelaksanaan pelelangan jasa konsultansi Penyusunan

Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

- Melakukan koordinasi secara berlanjut dengan pemangku kepentingan seperti Dishub Kab/Kota terkait dengan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Keterbatasan data dan perencanaan; kondisi infrastruktur dan konektivitas; keterlibatan dan minat operator; permasalahan regulasi dan kewenangan; aspek pendanaan dan dukungan anggaran; perubahan pola mobilitas masyarakat; koordinasi dan pengawasan.
- Hambatan administrasi dan perizinan; hambatan teknis kendaraan; rendahnya minat dan kapasitas operator; aspek regulasi dan kewenangan; hambatan infrastruktur dan fasilitas pendukung; aspek pendanaan dan dukungan kebijakan; koordinasi dan pengawasan.
- Keterbatasan data dan kajian tarif; kendala teknis dan operasional; hambatan regulasi dan prosedural; aspek kelembagaan dan koordinasi; faktor ekonomi dan sosial; keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan; pengaruh perubahan pola transportasi.
- Kondisi armada dan pelayanan operator; infrastruktur terminal dan fasilitas pendukung; aspek regulasi dan kelembagaan; permasalahan permintaan dan pola mobilitas; keterbatasan anggaran dan pembiayaan; aspek pengawasan dan penegakan hukum; pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan; koordinasi dan sinergi antar instansi.
- Peserta sosialisasi Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi masih perlu ditambah
- Belum adanya database perijinan yang terpadu menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi legalitas operasional kendaraan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian .
- Meningkatkan pengetahuan sumber daya operator angkutan umum, regulator dan stakeholder terkait.
- Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang kewajiban penyelenggara angkutan umum untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan.
- Meningkatkan dukungan dana dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan hasil pekerjaan jasa konsultasi PT Mahatma Jaya Mulya;
- Melakukan koordinasi dengan pihak operator taksi terkait dengan rencana dan bahasan sosialisasi Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi lanjutan;
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait seperti Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan proses dan prosedur izin penyelenggaraan angkutan taksi sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru (berlaku)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 57
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1.Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel 2.Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum	1. Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum 2. Mendukung keterjangkauan dan keadilan tarif angkutan umum 3. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

lintas jalan RENSTRA 2025-2029 1.Rasio Konektivitas Darat Persentase 2.Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar - Melaksanakan Konsultasi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain). - Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala. - Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula - Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu) - Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab.	4. Kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan perizinan angkutan 5. Mendukung keterpaduan perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan 6.Mewujudkan integrasi layanan dan manajemen angkutan umum perkotaan 7. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data

		HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin) - Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin - Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours 2. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan, Pemberlakuan, Pengawasan dan Pengendalian Tarif Angkutan Umum - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Umum - Penyebaran Data dan Informasi Tarif Angkutan Umum - Kegiatan Penyusunan Perhitungan Tarif Angkutan Umum - Kegiatan Rapat Analisis dan Penyusunan Tarif Angkutan Umum 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah	

		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Rapat Koordinasi Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan - Kegiatan Monitoring dan Sinkronisasi data Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek 5. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar	

		Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan - Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 6. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Kegiatan penyediaan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Kegiatan Rapat Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

1) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 58
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100

	Perkotaan Kewenangan Provinsi				
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yang terlaksana
- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum tidak dalam trayek yang berizin}}{\text{Jumlah Total Data terdaftar}} \times 100 \%$$

- Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yaitu jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 59

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi	-	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
3	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi								
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 60

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Ketersedian Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan	Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %

Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan				
RATA-RATA CAPAIAN				100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam 1 provinsi yang di terbitkan}}{\text{Jumlah kuota penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam 1 provinsi yang di ditetapkan}} \times 100\%$$

- Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang tersedia}}{\text{jumlah Kebutuhan Angkutan Orang yang menggunakan taksi yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 61

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang

dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi Indikator Kinerja yaitu Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan Indikator Kinerja Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kotadengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025..

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi mendapatkan realisasi 2 dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian jika realisasi mengalami kenaikan 2 dokumen.
- b. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi mendapatkan realisasi 2 dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian jika realisasi mengalami kenaikan 2 dokumen.
- c. Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan dan Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana jasa konsultansi PT Mahatma Jaya Mulya terkait pelaksanaan pelelangan jasa konsultansi Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- Melakukan koordinasi secara berlanjut dengan pemangku kepentingan seperti Dishub Kab/Kota terkait dengan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam hal ini Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Peserta sosialisasi Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi masih perlu ditambah
- Belum adanya database perijinan yang terpadu menyebabkan kesulitan dalam memverifikasi legalitas operasional kendaraan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan hasil pekerjaan jasa konsultansi PT Mahatma Jaya Mulya;
- Melakukan koordinasi dengan pihak operator taksi terkait dengan rencana dan bahasan sosialisasi Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi lanjutan;
- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait seperti Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan proses dan prosedur izin penyelenggaraan angkutan taksi sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru (berlaku)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 62
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2. Kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan perizinan angkutan 3. Mendukung keterpaduan perencanaan

	dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi 2. Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi 3. Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi RENSTRA 2025-2029 1. Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan 2. Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi 2. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Teknis Kebutuhan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan - Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan 4. Mewujudkan integrasi layanan dan manajemen angkutan umum perkotaan 7. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 63

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91 unit	91 unit	100
2	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100
3	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	0	0

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia tahun 2025
- Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yaitu jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yang tersedia
- Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan yaitu Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 64

**Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Buah	4015 Rit	6.570 Rit	86	91 unit	91 unit	100
2	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar	420 Buah	420 Unit	1 Laporan	400 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100

	kota dalam 1 (satu) provinsi							
3	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan	-	-	1 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0
Rata-Rata Capaian								67 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 65

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	100 %	100 %	100
2	Tersedianya kebijakan perencanaan jaringan jalur kereta api yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	100 %	0	100
RATA-RATA CAPAIAN					50

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah angkutan umum yang ditargetkan}} \times 100\%$$

- Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen Perencanaan Kereta Api}}{\text{Jumlah Target dokumen KA dalam setahun}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 66

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 91 unit dan realisasi 91 unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan indikator Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar

Kota dalam 1 (Satu) Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan indikator Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian dengan target 2 Dokumen dan realisasi 0 sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang) Indikator Kinerja yaitu Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang) dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Tersedianya kebijakan perencanaan jaringan jalur kereta api yang menjadi kewenangan provinsi Indikator Kinerja Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan dengan target 100 % dan realisasi 0 sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi mendapatkan realisasi 86 unit dan capaian 94.5 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi 5 unit dan capaian 6 %, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 99% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 1 %.

- b. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi mendapatkan realisasi 400 laporan dan capaian 95.23 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 5 %, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 99% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 1 %.
- c. Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian mendapatkan realisasi 0 dokumen dan capaian 0 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak mengalami perubahan capaian dan realisasi, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan capaian 50% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang) dan Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS
- Kegiatan pengawasan angkutan umum
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultasi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.
- Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula
- Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu)

- Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin)
- Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin
- Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Aturan Berubah untuk halte tidak perlu ukl/upl sedangkan simpul terminal tipe C ada di kabupaten dan Terminal tipe B ada di Provinsi sedangkan simpul terpecah – pecah 6 Kabupaten kota sehingga dengan waktu relatif singkat tidak mencukupi waktu pelaksanaan. Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan alat On Board Unit (OBU) belum masuk RK BMD dan proses Reclass (pemindahan pemanfaatan barang) di tahun 2025. Konsep tentang skema pembangunan perkeretaapian perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan R.I. dikarenakan jalur yang sekarang merupakan jalur Trans Kalimantan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Rapat Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Kegiatan Fasilitasi/Verifikasi Perijinan Angkutan Barang Umum dan Monitoring Perijinan Angkutan Barang Umum yang Sudah Terbit
- Monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- DED DED / Detail Engineering Design Penyediaan Angkutan Umum (Wilayah Saijaan Bersujud (Kab.Kotabaru Dan Tanah Bumbu))
- Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar
- Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Manajemen Pengelolaan (pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain).
- Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat –

Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala.

- Koordinasi, Sinkronisasi dan konsultasi penyediaan angkutan umum ke Dishub Kab/Kota, BAPPEDA, BPKAD, inspektorat, PT.Bagong, AINO, Kementerian Perhubungan dan lainnya.
- Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
- Konsep tentang skema pembangunan perkeretaapian perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan R.I. dikarenakan jalur yang sekarang merupakan jalur Trans Kalimantan.
- Untuk pelaksanaan 2026 apabila ada pembangunan Simpul terminal tipe atau perubahan pembangunan terminal tipe di laksanakan studi.
- Pelaksanaan Reclass barang sesuai klasifikasi barang tersebut

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 67
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan penyediaan angkutan umum BRT/BTS - Kegiatan pengawasan angkutan umum - Melaksanakan Sosialisasi Tarif Golongan Khusus Disabilitas, Lansia, Mahasiswa dan Pelajar - Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Manajemen Pengelolaan	1. Ketersediaan regulasi, perencanaan teknis, dan kajian pendukung yang komprehensif 2. Peningkatan kualitas layanan angkutan umum melalui pengelolaan dan pengawasan yang optimal 3. Dukungan terhadap aksesibilitas, keterjangkauan, dan inklusivitas layanan transportasi

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)		(pelaksanaan ramcek, pengaturan jadwal, dan lain-lain). - Melaksanakan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Manage Service Tap On Bus, Buy The Service (BTS) Koridor Term.Km17 Gambut Barakat – Banjarbaru, Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Bati-Bati, dan Koridor Term.Km17 Gambut Barakat - Siring 0 Kilometer Banjarmasin dan Koridor Term.Km.6 Banjarmasin - Barito Kuala. - Menyusun Kajian Studi Kelayakan (Feaseabilty Studi) kawasan Transit Oriented Development (TOD) kawasan Perkotaan Banjarbakula - Menyusun Kajian studi Penyusunan Perencanaan Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan di Wilayah Saijaan Bersujud Kewenangan Provinsi (Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu) - Menyusun Kajian studi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan kawasan Perkotaan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab.HST,Kab.HSS dan Kab.Tapin) - Menyusun Kajian Studi Perencanaan Masterplan Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Km.6 Banjarmasin	

		- Menyusun Kajian studi Perencanaan integrasi tarif angkutan umum antara Trans Perkotaan Banjarbakula dan Feeder/Pengumpan, ATP/WTP dan potensi Peak Hours dan Non Peaks Hours	
2	RENSTRA 2021- Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian RENSTRA 2025-2029 Tersedianya kebijakan perencanaan jaringan jalur kereta api yang menjadi kewenangan provinsi	Program Pengelolaan Perkeretaapian 1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 68
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	4 Laporan	100
2	Terlaksananya Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	100
3	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit	4 Unit	100

	Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100
6	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
7	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perkotaan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100

	Kewenangan Provinsi				
8	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Rata-rata capaian					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia
- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang tersedia

- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yaitu Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia
- Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yaitu Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan yaitu Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
- Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 69

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	-	-	-	12 Laporan	4 Unit	4 Unit	100

	Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan							
2	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100
3	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Buah	4 Dokumen	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
4	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	4 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi	-	-	-	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100

	Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
6	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
7	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100
8	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 70
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penetapan Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selata	Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	100 %	100 %	100 %
3	Tersedianya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi	Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	100 Nilai	100 nilai	100 %

	Kalimantan Selatan				
4	Meningkatnya Layanan Angkutan orang dalam trayek dan terminal	Persentase peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan orang dalam trayek dan terminal di wilayah provinsi	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi

$$\frac{\text{Jumlah jaringan trayek yang dilayani}}{\text{Jumlah jaringan trayek yang ditetapkan}} \times 100\%$$

- Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam 1 provinsi yang di terbitkan}}{\text{Jumlah kuota penyelenggaraan Angkutan orang dalam 1 provinsi yang di tetapkan}} \times 100$$

- Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

- Persentase peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan orang dalam trayek dan terminal di wilayah provinsi

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum memenuhi SMK}}{\text{Total perusahaan angkutan umum}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 71
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 %
4	Persentase peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan orang dalam trayek dan terminal di wilayah provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2021-2026 sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan indikatornya dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan indikator Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan

Angkutan Umum dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan dengan target 4 Unit dan realisasi 4 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 4 Dokumen dan

realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terkendalnya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya penetapan Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selatan Indikator Kinerja yaitu Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. Sasaran strategis Tersedianya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025. Sasaran strategis Meningkatnya Layanan Angkutan orang dalam trayek dan terminal Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan orang dalam trayek dan terminal di wilayah provinsi dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 8 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum mendapatkan realisasi 4 Laporan

dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaanya, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 99% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 1 %.

- b. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi mendapatkan realisasi 400 laporan dan capaian 95.23 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 5 %, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 99% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan capaian 1 %.
- c. Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian mendapatkan realisasi 0 dokumen dan capaian 0 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak mengalami perubahan capaian dan realisasi, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan capaian 50% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang) dan Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan

- Untuk memenuhi tingkat keberhasilan pemerintah provinsi dalam menetapkan jaringan trayek angkutan umum sesuai dengan rencana dan kebutuhan pelayanan transportasi di wilayahnya. Penetapan jaringan trayek mencakup proses penetapan lintasan, rute, dan jenis layanan angkutan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan administrasi di provinsi
- Untuk memenuhi tingkat keberhasilan pemberian rekomendasi izin izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan, dengan memberikan fasilitasi dan pengawasan yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan angkutan umum agar

berjalan tertib, teratur, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah provinsi.

- Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa angkutan dan operator penyedia layanan terhadap penetapan serta penerapan tarif kelas ekonomi pada layanan angkutan orang, baik antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, maupun angkutan perdesaan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna, operator dan stakeholder terkait lainnya.
- Untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta fasilitas terminal yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Aspek pelayanan meliputi kenyamanan, ketepatan waktu, kemudahan akses, dan kualitas sarana-prasarana, aspek keselamatan mencakup kepatuhan terhadap standar teknis kendaraan, kelaikan jalan, serta kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan. Upaya dan usaha yang dilakukan kepada operator diantaranya melakukan pembinaan dan sosialisasi; penilaian dan audit keselamatan; peningkatan kompetensi SDM; pengawasan dan penegakan aturan; pemanfaatan teknologi; budaya keselamatan (safety culture); sinergi pemerintah dan stakeholder.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Keterbatasan data dan perencanaan; kondisi infrastruktur dan konektivitas; keterlibatan dan minat operator; permasalahan regulasi dan kewenangan; aspek pendanaan dan dukungan anggaran; perubahan pola mobilitas masyarakat; koordinasi dan pengawasan. Hambatan administrasi dan perizinan; hambatan teknis kendaraan; rendahnya minat dan kapasitas operator; aspek regulasi dan kewenangan; hambatan infrastruktur dan fasilitas pendukung; aspek pendanaan dan dukungan kebijakan; koordinasi dan pengawasan. Keterbatasan data dan kajian tarif; kendala teknis dan operasional; hambatan regulasi dan prosedural; aspek kelembagaan dan koordinasi; faktor ekonomi dan sosial; keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan; pengaruh perubahan pola transportasi. Kondisi armada dan pelayanan operator; infrastruktur terminal dan fasilitas pendukung; aspek regulasi dan kelembagaan; permasalahan permintaan dan pola mobilitas; keterbatasan anggaran dan pembiayaan; aspek pengawasan dan penegakan

hukum; pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan; koordinasi dan sinergi antar instansi.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian
- Meningkatkan pengetahuan sumber daya operator angkutan umum, regulator dan stakeholder terkait. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang kewajiban penyelenggara angkutan umum untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan.
- Meningkatkan dukungan dana dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 72
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2. Terlaksananya Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 3. Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan, Pemberlakuan, Pengawasan dan Pengendalian Tarif Angkutan Umum - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Umum - Penyebaran Data dan Informasi Tarif Angkutan Umum	1. Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum 2. Mendukung keterjangkauan dan keadilan tarif angkutan umum 3. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 4. Kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan perizinan angkutan 5. Mendukung keterpaduan perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan 6. Mewujudkan integrasi layanan dan manajemen angkutan umum perkotaan

4. Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 6. Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7. Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perkotaan Kewenangan Provinsi 8. Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas	- Kegiatan Penyusunan Perhitungan Tarif Angkutan Umum - Kegiatan Rapat Analisis dan Penyusunan Tarif Angkutan Umum 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Kegiatan Rapat Koordinasi Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan - Kegiatan Monitoring dan Sinkronisasi data Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek 3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	7. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data

Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi RENSTRA 2025-2029 1. Meningkatnya penetapan Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selata 2. Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan 3. Tersedianya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan 4. Meningkatnya Layanan Angkutan orang dalam trayek dan terminal	Antarkota Kewenangan Provinsi 4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Kegiatan penyediaan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Kegiatan Rapat Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

6. Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 73

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	50%	50%	100%
		Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2.25%	0%	110%
		Persentase Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas	2.25%	0%	110%
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi	25%	25%	100%
		Persentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	20%	20%	100%
		Persentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	100%	100%	100%
		Rata-Rata Capaian			103 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa

Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X) dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).

- Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel

$$\frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang}}{100.000 \text{ Keberangkatan}}$$

- Presentase Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas

$$\frac{\text{Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas}}{100.000 \text{ Keberangkatan}}$$

- Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan
Perlengkapan Jalan Provinsi

Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan

- Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan

Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan (X)
dengan Jumlah Dokumen Andalalin yang masuk (Y).

- Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

Jumlah monitoring Unit Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di
kalsel terhadap jumlah Total Unit Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Di
Kalsel

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai
berikut :

Tabel 3. 74

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100 %
2	Presentase	-	0%	0%	0%	0%	100%	100 %

	Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas							
3	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	-	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
4	Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi	-	-	-	-	25%	25%	100 %
5	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	-	-	-	-	20%	20%	100 %
6	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	-	-	-	-	100%	100%	100 %
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 75
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	% Capaian (6)
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi	Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

$$\frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kecelakaan tahun berjalan}}{\text{Jumlah kecelakaan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 76
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber Data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan memiliki indikator kinerja sebanyak 6 indikator yaitu :

Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa dengan target 50 % dan realisasi 50 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalimantan Selatan Indikator ini memiliki target sebesar 2,25%, dengan realisasi sebesar 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 110% pada tahun 2025.

Persentase Pengguna Jalan yang Melanggar Lalu Lintas Target yang ditetapkan sebesar 2,25%, dengan realisasi sebesar 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 110% pada tahun 2025.

Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi Indikator ini memiliki target sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% pada tahun 2025.

Persentase Jumlah Dokumen Andalalin yang Diterbitkan Target pada indikator ini sebesar 20%, dengan realisasi sebesar 20%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% pada tahun 2025.

Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi memiliki indikator kinerja yaitu Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi ini ditetapkan dengan target 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 6 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa mendapatkan realisasi 100% dan capaian 100 % pada tahun 2024

dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100 % dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- b. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalimantan Selatan mendapatkan realisasi 0% dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian karena ini kinerja capaian negatif, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.
- c. Persentase Pengguna Jalan yang Melanggar Lalu Lintas mendapatkan realisasi 0% dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian karena ini kinerja capaian negatif, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan.
- d. Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Persentase Jumlah Dokumen Andalalin yang Diterbitkan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Penyediaan Perlengkapan jalan di 13 kabupaten kota melakukan pemasangan rambu-rambu, zoss, PJU, warning light, APILL, Rambu Chevron,

Marka Jalan dan Guardril di Jalan-jalan yang prioritas berdasarkan DRK dan permintaan Dinas kabupaten /kota setempat.

- Melaksanakan Rapat , Kordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan Evaluasi penyediaan perlengkapan jalan
- Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab. Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru)
- Melaksanakan Rapat - Kordinasi - Konsultasi - Monitoring – Evaluasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Melaksanakan rapat, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR), Pelaksanaan FGD U Turn A. Yani, Kajian DRK Jalan Baru BJB-BTL, Penataan DRK Kab.Banjar, LHR Kota BJM, BJB dan Kab. Banjar, Kajian DRK Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu.
- Melaksanakan Kegiatan Pelajar Pelopor
- Melaksanakan Sosialisasi PPKJ di Kab. Tabalong, Sosialisasi di Kab. HSS, Sosilisasi WTN, Pelaksanaan PPKJ Tingkat Prov. Kalsel, Pelaksanaan PPKJ Tingkat Nasional, Koordinasi WTN
- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan seperti inspeksi ketupat intan dan berkoordinansi dengan stake holder terkait dari kepolisian untuk melaksanakan beberpa inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas di Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H/2025M di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas di Siring KM0, Malam Temu Karya Taman Budaya se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya se Indonesia
- Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus akibat perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. ODOL dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median LDS, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti.

- Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penilaian Hasil Andalalin LotteMart Banjarmasin, SPBU Sei Ulin, Perum Granada, Amanah Borneo Park, Pengemb. Q Mall, By Pass Banjar – BT.Licin, Pabrik Plywood PT. Shafwah EI, Perkantoran dan Workshop PT. SADP, Lapangan Padel, Perumahan PT. HBB, Jembatan Pulau Laut, Kawasan Perkantoran Tanbu.
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe dan Resto Hexagon BJM, LAN, Bukit Bintang, LAN, Dlegenda, Toko ALAN, Perumahan Granada
- Melaksanakan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penguji Kendaraan Bermotor)
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 13 Kab/Kota
- Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi semakin banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang Buku Uji Kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT), Kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Dokumen Andalalin bagi kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas masih kurang, Perlengkapan peralatan Survey Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas belum memadai, Kepatuhan para pembangun terhadap rekomendasi Andalalin belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
- Melaksanakan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi seperti halte

- Melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan Marka Jalan, Paku Marka Jalan, Pju Ac Konvensional Tiang Single, Pju Ac Konvensional Tiang Double, Rambu Chevron, Rambu Jalan Dan Apill Otonom
- Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan seperti halte
- Melaksanakan Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar seperti Pju Ac Kabel Tanam Dan Pju Ac Kabel Udara
- Melaksanakan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR)
- Melaksanakan pelajar pelopor
- Melaksanakan Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, Menunjang Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota se Kalimantan Selatan
- Melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas seperti Kerucut lalu lintas (rubber cone)
- Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penguji Kendaraan Bermotor)
- Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 13 Kab/Kota
- Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 77
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan RENSTRA 2025-2029 Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat terkait Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj) 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLaj Provinsi - Melaksanakan Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi Penetapan Dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi - Penyediaan Perlengkapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan-jalan Yang Prioritas Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat. - Melaksanakan Rapat , Kordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Perlengkapan Jalan - Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab. Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru)	1. Perencanaan dan kebijakan yang terarah dan terkoordinasi 2. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang merata dan tepat sasaran 3. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang adaptif terhadap kondisi lapangan 4. Penguatan pengawasan dan pengendalian dampak lalu lintas Pembangunan 5. Fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan budaya tertib berlalu lintas

		- Melaksanakan Rapat - Kordinasi - Konsultasi - Monitoring – Evaluasi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (Lhr), Pelaksanaan Fgd U Turn A. Yani, Kajian Drk Jalan Baru Bjb-Btl, Penataan Drk Kab.Banjar, Lhr Kota Bjm, Bjb Dan Kab. Banjar, Kajian Drk Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu. - Melaksanakan Kegiatan Pelajar Pelopor - Melaksanakan Sosialisasi Ppkj Di Kab. Tabalong, Sosialisasi Di Kab. Hss, Sosialisasi Wtn, Pelaksanaan Ppkj Tingkat Prov. Kalsel, Pelaksanaan Ppkj Tingkat Nasional, Koordinasi Wtn - Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinasi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul	

		Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia - Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti. 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi - Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada - Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Hasil Andalalin Lottemart Banjarmasin, Spbu Sei Ulin, Perum Granada, Amanah Borneo Park, Pengemb. Q Mall, By Pass Banjar – Bt.Licin, Pabrik Plywood Pt. Shafwah Ei, Perkantoran Dan Workshop Pt. Sadp, Lapangan Padel, Perumahan Pt. Hbb, Jembatan Pulau Laut, Kawasan Perkantoran Tanbu. 5. Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaaj Di Jalan	

		- Melaksanakan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dan Penguji Kendaraan Bermotor) - Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss) 13 Kab/Kota - Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	

1) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 78
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	14 Laporan	14 Laporan	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yaitu Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana dan telah dilaporkan sesuai dengan jumlah rencana kegiatan sesuai dengan yang peranggarkan selama satu tahun anaggaran berjalan.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 79

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	20 Ruas	13 Kab/Kota	12 Laporan	11 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 80

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait Pengawasan	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	100%	100

	manajemen dan rekayasa lalu lintas				
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas}}{\text{Jumlah target Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Keseluruhan dalam setahun}} \times 100 \%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 81

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dengan target 14 Laporan dan realisasi 14 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan indikator kinerja Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi mendapatkan realisasi 11 laporan dan capaian 91.7 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 ada kenaikan 1% capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata 98% dibandingkan tahun 2025 mengalami peningkatan 2% capaian.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan seperti inspeksi ketupat intan dan berkoordinansi dengan stake holder terkait dari kepolisian untuk melaksanakan beberpa inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas di Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H/2025M di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas di Siring KM0, Malam Temu Karya Taman Budaya se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya se Indonesia

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi semakin banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang Buku Uji Kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi, Menunjang Pengamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Angkutan Umum di Kab/Kota se Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 82
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi RENSTRA 2025-2029 Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan indikator kinerja Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj) 1. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading Dan Angkutan Umum Di Kab/Kota Se Kalimantan Selatan Seperti Inspeksi Ketupat Intan Dan Berkoordinansi Dengan Stake Holder Terkait Dari Kepolisian Untuk Melaksanakan Beberapa Inspeksi, Pengamanan Lalu Lintas Di Maulid Nabi Muhammad Saw 1447h/2025m Di Sabilal Muhtadin, Bersih2 Sungai Harhubnas Di Siring Km0, Malam Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia, Maulid Nabi& Haul Ibunda Wagub, Pawai Budaya Se Indonesia	1. Perencanaan dan kebijakan yang terarah dan terkoordinasi 2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang adaptif terhadap kondisi lapangan 3. Penguatan pengawasan dan pengendalian dampak lalu lintas Pembangunan 4. Fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan budaya tertib berlalu lintas

	Lintas yang berkeselamatan		

2) Eselon IV (Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 83

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	488 Unit	488 Unit	100
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	522 Unit	522 Unit	100
3	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	100

4	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
5	Tersedianya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	14 Lokasi	14 Lokasi	100
6	Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi .	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi :

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}}$$
- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan :

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang terpelihara}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}$$
- Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi :

$$\frac{\text{Jumlah unit Pelaksana pengujian bermotor yang ada di kalsel}}{\text{Jumlah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dibina}}$$
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) :

$$\frac{\text{Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi}}$$
- Tersedianya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) :

$$\frac{\text{Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)}}$$
- Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi :

*Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Provinsi*

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 84

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	279 Unit	1239 unit	926 Unit	4006 Unit	488 Unit	488 Unit	100%
2	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	80 Unit	431 Unit	372 unit	704 Unit	522 Unit	522 Unit	100%
3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13 Buah	4 Kab/Kota	13 laporan	13 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	-	-	-	-	4 Lokasi	4 Lokasi	100%
5	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	-	-	-	14 Lokasi	14 Lokasi	100%

6	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian								100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 85
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Jalan yang terpasang di jalan Provinsi sesuai standar	Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	100%	100%	100%
2	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi	Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Rumus Perhitungan :

- Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Jalan yang terpasang di jalan Provinsi sesuai standar:

$$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di jalan provinsi sesuai standar}}{\text{Jumlah Kebutuhan perlengkapan jalan di jalan provinsi}} \times 100\%$$

- Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Jumlah realisasi dokumen rencana induk llaj provinsi

- Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi :

$$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah Prasarana Keselamatan yang Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Prasarana Keselamatan yang dibutuhkan}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang Sesuai Standar Keselamatan}}{\text{Jumlah Sarana Keselamatan yang dibutuhkan}} \right)}{2} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 86
Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia dengan target 488 Unit dan realisasi 488 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 522 Unit dan realisasi 522 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) indikator kinerja Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) indikator kinerja Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan target 14 Lokasi dan realisasi 14 Lokasi sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi indikator kinerja Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi .dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Jalan yang terpasang di jalan Provinsi sesuai standar dan indikator kinerja Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ Provinsi dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025. Sasaran strategis Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi indicator Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia mendapatkan realisasi 4006 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi capaian, untuk tahun 2021- 2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian. Indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara mendapatkan realisasi 704 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan realisasi 13 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian untuk tahun 2021-2024 mendapatkan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Indikator kinerja Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi, Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Penyediaan Perlengkapan jalan di 13 kabupaten kota melakukan pemasangan rambu-rambu, zoss, PJU, warning light, APILL, Rambu Chevron, Marka Jalan dan Guardril di Jalan-jalan yang prioritas berdasarkan DRK dan permintaan Dinas kabupaten /kota setempat.

- Melaksanakan Rapat , Kordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan Evaluasi penyediaan perlengkapan jalan
- Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab. Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru)
- Melaksanakan Rapat - Kordinasi - Konsultasi - Monitoring – Evaluasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Melaksanakan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penguji Kendaraan Bermotor)
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 13 Kab/Kota
- Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi masih ditemukan Lokasi yang belum tersedia perlengkapan jalan dan Lokasi yang jauh dan tidak mudah dijangkau seperti jalan yang rusak dan lainnya.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
- Melaksanakan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi seperti halte
- Melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan Marka Jalan, Paku Marka Jalan, Pju Ac Konvensional Tiang Single, Pju Ac Konvensional Tiang Double, Rambu Chevron, Rambu Jalan Dan Apill Otonom
- Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan seperti halte
- Melaksanakan Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar seperti Pju Ac Kabel Tanam Dan Pju Ac Kabel Udara

- Melaksanakan Kegiatan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penguji Kendaraan Bermotor)
- Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 13 Kab/Kota
- Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 87
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi 2. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 4. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) 5. Tersedianya Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi - Melaksanakan Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi Penetapan Dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi - Penyediaan Perlengkapapan Jalan Di 13 Kabupaten Kota Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu, Zoss, Pju, Warning Light, Apill, Rambu Chevron, Marka Jalan Dan Guardril Di Jalan-jalan Yang Perioritas Berdasarkan Drk Dan Permintaan Dinas Kabupaten /Kota Setempat. - Melaksanakan Rapat , Kordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Perlengkapan Jalan - Melaksanakan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Seperti Pju Ac Kabel Udara (Daerah Kab.	1. Perencanaan dan kebijakan yang terarah dan terkoordinasi 2. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang merata dan tepat sasaran 3. Fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan budaya tertib berlalu lintas

	6. Terlaksananya Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi RENSTRA 2025-2029 1. Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Jalan yang terpasang di jalan Provinsi sesuai standar 2. Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi	Banjar Dan Kota Banjarbaru), Pju Solarcell Banjarbakula, Pju Solarcell (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin), Rambu (Daerah Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu-Kotabaru), Rppj (Kota Banjarbaru) - Melaksanakan Rapat - Kordinasi - Konsultasi - Monitoring – Evaluasi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan - Melaksanakan Pengawasan / Pembinaan (Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dan Penguji Kendaraan Bermotor) - Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss) 13 Kab/Kota - Melaksanakan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	

3) Eselon IV (Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 88

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	100
2	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	8 Laporan	110
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	12 Laporan	110
4	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	4 Laporan	100
5	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Jaringan Provinsi	Jalan				

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi :

Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X) dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).

- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi :

Perbandingan antara Pelaksanaan Koordinasi Forum LLAJ (X) dengan Jumlah Rencana permasalahan LLAJ yang akan timbul (Y).

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin :

Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan (X) dengan Jumlah Dokumen Andalalin yang masuk (Y).

- Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi :

Perbandingan antara Jumlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap rekomendasi suatu kegiatan/usaha (X) dengan Jumlah Rekomendasi yang telah diterbitkan (Y).

- Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi:

Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 89

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	5 Ruas	12 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

	untuk jaringan jalan provinsi							
2	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	-	8 kali	6 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	110%
3	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	-	-	11 Laporan	15 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	110%
4	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	20 Ruas	10 Dokumen	6 Kali	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
5	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	13 kab/kota	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian								104%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 90
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan rekomendasi andalalin yang terpantau di jalan kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

- Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas}}{\text{Jumlah target Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Keseluruhan dalam setahun}} \times 100 \%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 91
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%

2	Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan RENSTRA 2025-2029

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 8 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan target 4 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terawasinya pelaksanan rekomendasi andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Meningkatnya Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan dan indikator

kinerja Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dan indikator kinerja Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi mendapatkan realisasi 6 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi mendapatkan realisasi 7 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin mendapatkan realisasi 15 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Indikator Kinerja Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi mendapatkan realisasi 10 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi mendapatkan realisasi 4 dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024

dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa renstra 2025-2029 Indikator Kinerja yaitu Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan dan Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan merupakan indikator kinerja tahun 2025 terbaru sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan rapat, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (LHR), Pelaksanaan FGD U Turn A. Yani, Kajian DRK Jalan Baru BJB-BTL, Penataan DRK Kab.Banjar, LHR Kota BJM, BJB dan Kab. Banjar, Kajian DRK Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu.
- Melaksanakan Kegiatan Pelajar Pelopor
- Melaksanakan Sosialisasi PPKJ di Kab. Tabalong, Sosialisasi di Kab. HSS, Sosialisasi WTN, Pelaksanaan PPKJ Tingkat Prov. Kalsel, Pelaksanaan PPKJ Tingkat Nasional, Koordinasi WTN
- Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus akibat perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. ODOL dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median LDS, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti.
- Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penilaian Hasil Andalalin LotteMart Banjarmasin, SPBU Sei Ulin, Perum Granada, Amanah Borneo Park, Pengemb. Q Mall, By Pass Banjar – BT.Licin, Pabrik Plywood PT. Shafwah EI, Perkantoran dan Workshop PT. SADP, Lapangan Padel, Perumahan PT. HBB, Jembatan Pulau Laut, Kawasan Perkantoran Tanbu.

- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe dan Resto Hexagon BJM, LAN, Bukit Bintang, LAN, Dlegenda, Toko ALAN, Perumahan Granada

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi semakin banyak ditemukan Kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Dokumen Andalalin bagi kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas masih kurang, Perlengkapan peralatan Survey Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas belum memadai, Kepatuhan para pembangun terhadap rekomendasi Andalalin belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas seperti Kerucut lalu lintas (rubber cone)
- Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 92
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1	RENSTRA 2021-2026 1. Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 1. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemetaan Lalu Lintas Harian Rata - Rata (Lhr), Pelaksanaan Fgd U Turn A. Yani, Kajian Drk Jalan Baru Bjb-Btl, Penataan Drk Kab.Banjar, Lhr Kota Bjm, Bjb	1. Perencanaan dan kebijakan yang terarah dan terkoordinasi 2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang

2. Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 3. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4. Terawasnya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 5. Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dan Kab. Banjar, Kajian Drk Kab Tanbu, Kajian Penataan Kawasan Perkantoran Bupati Tanah Bumbu. - Melaksanakan Kegiatan Pelajar Pelopor - Melaksanakan Sosialisasi Ppkj Di Kab. Tabalong, Sosialisasi Di Kab. Hss, Sosilisasi Wtn, Pelaksanaan Ppkj Tingkat Prov. Kalsel, Pelaksanaan Ppkj Tingkat Nasional, Koordinasi Wtn - Melaksanakan Koordinasi Forum Kesiapan Jalan Baru Bandara, Kesiapan Arus Mudik Dan Angkutan Lebaran, Pengalihan Arus Akibat Perbaikan Jemb.Sei Batang Banyu, Penggantian Jemb Sei Ulin. Sosialisasi Angk. Odol Dan Batu Bara, Rehabilitasi Jembatan Sebamban, Pemanfaatan Jalan Bandara, Perbaikan Jembatan Barito. Perbaikan Jembatan Semanyap, Pembangunan Median Lds, Penataan Median Pabrik Busa Handil Bakti. 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi - Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Pengembangan Cafe Dan Resto Hexagon Bjm, Lan, Bukit Bintang, Lan, Dlegenda, Toko Alan, Perumahan Granada - Melaksanakan Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Hasil Andalalin Lottemart Banjarmasin, Spbu Sei Ulin, Perum Granada, Amanah Borneo Park, Pengemb. Q Mall, By Pass Banjar – Bt.Licin, Pabrik Plywood Pt. Shafwah Ei, Perkantoran Dan Workshop Pt.	adaptif terhadap kondisi lapangan 3. Penguatan pengawasan dan pengendalian dampak lalu lintas Pembangunan 4. Fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan budaya tertib berlalu lintas
RENSTRA 2025-2029 1. Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan 2. Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu		

	Lintas yang berkeselamatan	Sadp, Lapangan Padel, Perumahan Pt. Hbb, Jembatan Pulau Laut, Kawasan Perkantoran Tanbu.	

7. Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut:

Tabel 3. 93
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Operasional Pelayanan Terminal tipe B	78 %	90%	110
2	Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100
		Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100
		Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar	60 %	70%	110

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B yaitu Survey kepuasan Pengguna Terminal Tipe B
- Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang tersusun}}{\text{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang di kelola}} \times 100\%$$

- Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian yang dilayani}}{\text{Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian yang diajukan}} \times 100\%$$

- Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B yaitu Jumlah Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan yang disusun dan dilaporkan
- Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar yaitu *sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar / Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang tersedia x100%*

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 94

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	80 %	77,55%	77,55%	78%	78 %	90%	110
2	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	-	96,22%	96,22%	100%	100%	100%	100

	UPTD Terminal Tipe B							
3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar	-	-	-	-	60 %	70%	110
Rata-Rata Capaian								104

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut:

Tabel 3. 95
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT Dinas Perhubungan	Persentase kegiatan tepat waktu	100%	90	90
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	100%	100
		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	100 Nilai	100
		Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait	100%	100%	100

		Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti			
		Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	100%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80 Angka	70 Angka	87.5
		Nilai pendapatan UPT	100000000 0 Rupiah	154.448.000 Rupiah	110
2	Meningkatnya pelayanan terminal penumpang tipe b	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe b	100%	90%	90%
RATA-RATA CAPAIAN					97.19 %

Sumber : Laporan Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Persentase kegiatan tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

- Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah laporan/telaah yang selesai tepat waktu}}{\text{Total laporan/telaah yang ditugaskan}} \times 100\%$$

- Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal

$$\frac{\text{Jumlah item administrasi yang dipatuhi}}{\text{Jumlah total item yang diwajibkan}} \times 10$$

- Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Aduan yang Masuk}} \times 100\%$$

- Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat

$$\frac{\sum \text{Skor aktual}}{\sum \text{Skor maksimal}} \times 100$$

- Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT

Metode survey terhadap layanan Terminal

- Nilai pendapatan UPT

Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya + 10%

- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe b
Survei Kepuasan Masyarakat (*pelayanan terminal penumpang tipe B*)

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 96

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kegiatan tepat waktu	92.39	100%	90	90
2	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%	100%	100%	100
3	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100
4	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100
5	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100%	100%	100%	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	70 Angka	80 Angka	70 Angka	87.5
7	Nilai pendapatan UPT	154.448.000 Rupiah	100000000 Rupiah	154.448.000 Rupiah	110
8	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe b	90%	100%	90%	90%
RATA-RATA CAPAIAN					97.19 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

1) **Perbandingan Realisasi dengan Target;**

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B dan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Operasional Pelayanan Terminal tipe B dengan target 78 % dan realisasi 90 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B memiliki indikator kinerja sebanyak 4 indikator yaitu :

Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Persentase Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar dengan target 60 % dan realisasi 70 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 110 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2026 sasaran strategis Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 98.21% dan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase kegiatan tepat waktu dengan target 100% mendapatkan realisasi 90% dan capaian kinerja sebesar 90% pada tahun 2025.
2. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal dengan target 100 Nilai mendapatkan realisasi 100 Nilai dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat dengan target 100% mendapatkan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT dengan target 80 Angka mendapatkan realisasi 70 Angka dan capaian kinerja sebesar 87.5 % pada tahun 2025.
7. Nilai pendapatan UPT dengan target 100.000.000 mendapatkan realisasi 154.448.000 dan capaian kinerja sebesar 110% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan terminal penumpang tipe b dan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe b dengan target 100 % dan realisasi 90 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 90 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Operasional Pelayanan Terminal tipe B mendapatkan realisasi 78 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 97 % dan capaian 97% dibandingkan tahun 2025 mengalami peningkatan 3 %.
- c. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100% dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.

- d. Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B mendapatkan realisasi 100 % dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100% dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- e. Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar mendapatkan merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2024 dan tahun sebelumnya 2021-2024..

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase kegiatan tepat waktu merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- g. Nilai pendapatan UPT merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- h. Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe b merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran dengan melakukan rapat monitoring secara triwulanan
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (dinas perhubungan dan Dishub/Terminal kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti penyusunan rencana kerja tahun 2025, renstra tahun 2025-2029 laporan capaian kinerja, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan, penatausahaan barang milik daerah dan lainnya
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek SAKIP, PBJ, Laporan Keuangan, ANJAB dan ABK, Manajemen ASN dan lain lain.
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian seperti dokumen-dokumen surat penanggung jawaban yang lengkap, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, penginputan dan rekon keuangan yang tepat waktu, ketertiban pegawai.
- Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran seperti pemeliharaan Gedung kantor Terminal Tipe B, pakaian dinas serta atribut, pembayaran pajak kendaraan, mabel dan lainnya.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja UPTD Tahun Anggaran 2026
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan capaian kinerja
- Melaksanakan survei masyarakat ke kab/kota.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.

- Pembelian ATK, mabel dan lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, secretariat dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 97
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Renstra 2021-2026 1. Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B 2. Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang	1. Dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berjalan optimal 2. Ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang kerja yang memadai 3. Terpenuhinya layanan jasa penunjang operasional secara berkelanjutan 4. Pengawasan dan pengelolaan terminal penumpang Tipe B yang konsisten
	Renstra 2025-2029 1. Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan		

	UPT Dinas Perhubungan 2. Meningkatnya pelayanan terminal penumpang tipe b	Cetakan dan Penggandaan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B - Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	

1) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 98
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100
2	Terawasanya Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	5 Unit	5 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 99
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	80 %	52 %	100 %	5 Unit	6 Unit	6 Unit	100
2	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	-	-	100 %	1 Unit	5 Unit	5 Unit	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2023

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Trans Perkotaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel 3. 100
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100
2	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	5 Unit	5 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber : Laporan Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 101

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama
Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92.39	7 Unit	7 Unit	100
2	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	100%	5 Unit	5 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan Renstra 2025-2029

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 7 Unit dan realisasi 7 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terawasanya Operasional Terminal Penumpang Tipe B dan indikator kinerja Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 7 Unit dan realisasi 7 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B dan indikator kinerja Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi mendapatkan realisasi 1 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian dan realisasi mengalami kenaikan 5 unit, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian.
- b. Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi mendapatkan realisasi 5 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 83 % dan capaian 83% dibandingkan tahun 2025 mengalami peningkatan 17%.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- 1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi mendapatkan realisasi 1 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian dan realisasi mengalami kenaikan 5 unit, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian.
- 2) Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi mendapatkan realisasi 5 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 83 % dan capaian 83% dibandingkan tahun 2025 mengalami peningkatan 17%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran dengan melakukan rapat monitoring secara triwulanan
- Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi ke terminal tipe b di kab/kota
- Melaksanakan rehabilitasi Gedung Terminal Tipe B di Jalan Pramuka Banjarmasin

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja UPTD Tahun Anggaran 2026
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Pembelian ATK, mabel dan lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, secretariat dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)
- Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi ke terminal tipe b di kab/kota
- Melaksanakan rehabilitasi Gedung Terminal Tipe B di Jalan Pramuka Banjarmasin

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 102
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Renstra 2021-2026 1. Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang kerja yang memadai 3. Pengawasan dan pengelolaan terminal

2. Terawasinya Operasional Terminal Penumpang Tipe B Renstra 2025-2029 1. Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B - Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	penumpang Tipe B yang konsisten

2) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal UPTD Terminal Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal UPTD Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 103

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 104

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	26 Unit	42 Unit	6 Unit	6 Unit	100
Rata-Rata Capaian								100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Layanan Terminal UPTD Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 105

Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100

RATA-RATA CAPAIAN	100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 106

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan indikator kinerja Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target 6 Unit dan realisasi 6 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2025-2029 sasaran strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan indikator kinerja Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target 6 Unit dan realisasi 6 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mendapatkan realisasi 42 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata capaian 95% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan 5% capaian.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mendapatkan realisasi 42 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2023-2024 mendapatkan rata-rata capaian 95% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan 5% capaian.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran dengan melakukan rapat monitoring secara triwulanan
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (dinas perhubungan dan Dishub/Terminal kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti penyusunan rencana kerja tahun 2025, renstra tahun 2025-2029 laporan capaian kinerja, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan, penatausahaan barang milik daerah dan lainnya
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek PBJ dan lain lain.
- Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran seperti pemeliharaan Gedung kantor Terminal Tipe B, pakaian dinas serta atribut, pembayaran pajak kendaraan, mabel dan lainnya.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak

menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja UPTD Tahun Anggaran 2026
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan capaian kinerja
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Pembelian ATK, mabel dan lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, secretariat dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 107
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Renstra 2021-2026 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berjalan optimal 2. Ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang kerja yang memadai 3. Terpenuhinya layanan jasa penunjang operasional secara berkelanjutan

	Renstra 2025-2029 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jasa Pelayanan Umum Kantor	

3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 108
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100

3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100
4	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
7	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111 Laporan	111 Laporan	100

10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b yaitu laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b

- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b
- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 109

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	1 Dokumen	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
4	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Stel	74 Stel	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
5	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 Bulan	12 Bulan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100

8	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 Orang	12 Bulan	124 Laporan	166 Laporan	114 Laporan	114 Laporan	100
10	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Buah	2 Buah	1 Unit	5 Unit	9 Unit	9 Unit	100
11	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
12	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	8 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit	100
14	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	12 Bulan	38 Unit	23 Unit	25 Unit	25 Unit	100
Rata-Rata Capaian								100

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Renstra 2025-2029 sebaga berikut :

Tabel 3. 110
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas barang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

	milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah				
2	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%
6	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%

RATA-RATA CAPAIAN

100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2025

Rumus Perhitungan :

- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

$$\frac{\text{Jumlah relaisasi Barang yang wajib dipelihara}}{\text{jumlah Barang yang ditargetkan}} \times 100\%$$

untuk dipelihara dalam satu tahun

- Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun

$$\frac{\text{Jumlah relisasi Laporan keuangan yang disusun}}{\text{Jumlah laporan keuangan yang}} \times 100\%$$

ditargetkan untuk disusun dalam satu tahun

- Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Laporan Pelayanan yang disusun}}{\text{Jumlah Laporan Pelayanan yang}} \times 100\%$$

ditargetkan dalam satu tahun

- Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM

$$\frac{\text{Jumlah relisasi SDM yang mengikuti}}{\text{Jumlah SDM yang ditargetkan mengikuti}} \times 100\%$$

pendidikan dan pelatihan
pelatihan dalam setahun

- Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Administrasi}}{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah}} \times 100\%$$

Barang Milik Daerah yang disusun
yang ditergetkan untuk disusun dalam satu tahun

- Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

$$\frac{\text{Jumlah realisasi Laporan Administrasi}}{\text{Jumlah Laporan Administrasi}} \times 100\%$$

umum yang telah disusun
umum yang ditargetkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 111

Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2025		
		2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
4	Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2025 dan LAKIP 2021-2024

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Renstra 2021-2026 sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal

tipe b dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 Paket dan realisasi 2 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target 2 Paket dan realisasi 2 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 114 Laporan dan realisasi 114 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 9 Unit dan realisasi 9 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 8 Unit dan realisasi 8 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara dengan target 25 Unit dan realisasi 25 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari Renstra 2025-2029 memiliki sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Laporan

Keuangan Yang Disusun dengan target 100% dan realisasi 100% Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

- b. Sasaran Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- c. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- d. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- e. Sasaran Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.
- f. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2025.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2021-2026 memiliki 14 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan realisasi 1 Dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.
- b. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mendapatkan realisasi 1

laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 1 laporan dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perubahan dalam realisasi dan capaian.

- c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD mendapatkan realisasi 4 laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 4 laporan dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- d. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan mendapatkan realisasi 1 Paket dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- e. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mendapatkan realisasi 1 Paket dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- f. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mendapatkan realisasi 2 Paket dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- g. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan mendapatkan realisasi 2 Paket dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- h. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan mendapatkan realisasi 1 Dokumen dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan

realisasi, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata realisasi 100% dan capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.

- i. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mendapatkan realisasi 166 Laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- j. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mendapatkan realisasi 5 unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- k. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan mendapatkan realisasi 1 Laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- l. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan mendapatkan realisasi 4 Laporan dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi.
- m. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya mendapatkan realisasi 7 unit dan capaian 87.5 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian, untuk tahun 2021-2024 mendapatkan rata-rata capaian 97% dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan rata-rata capaian.
- n. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara mendapatkan realisasi 23 Unit dan capaian 100 % pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian dan realisasi, untuk tahun 2022-2024 mendapatkan rata-rata capaian 100% dibandingkan tahun 2025 tidak ada perbedaan capaian.

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari RENSTRA Tahun 2025-2029 memiliki 6 Indikator Kinerja yaitu :

- a. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- e. Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
- f. Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja terbaru tahun 2025 sehingga tidak ada perbandingan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran dengan melakukan rapat monitoring secara triwulanan
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (dinas perhubungan dan Dishub/Terminal kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti penyusunan rencana kerja tahun 2025, renstra tahun 2025-2029 laporan capaian kinerja, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan, penatausahaan barang milik daerah dan lainnya
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek SAKIP, PBJ, Laporan Keuangan, ANJAB dan ABK, Manajemen ASN dan lain lain.

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian seperti dokumen-dokumen surat penanggung jawaban yang lengkap, melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, penginputan dan rekon keuangan yang tepat waktu, ketertiban pegawai.
- Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran seperti pemeliharaan Gedung kantor Terminal Tipe B, pakaian dinas serta atribut, pembayaran pajak kendaraan, mabel dan lainnya.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penyesuaian DPA, sehingga beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama tidak dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan Implementasi manajemen kinerja belum menyeluruh, Inventarisasi aset belum optimal.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan Kegiatan Rencana Kerja UPTD Tahun Anggaran 2026
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan capaian kinerja
- Melaksanakan survei masyarakat ke kab/kota.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Pembelian ATK, mabel dan lainnya.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian dengan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang teknis perhubungan (bidang angkutan jalan, lalu lintas jalan, pelayaran, secretariat dan Dishub kab/kota Kalimantan Selatan) dan instansi terkait (BAPPEDA, BPKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Biro Pemerintahan, BKD, Kominfo dan lainnya)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu :

Tabel 3. 112
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Renstra 2021-2026 1. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berjalan optimal 2. Ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang kerja yang memadai 3. Terpenuhinya layanan jasa penunjang operasional secara berkelanjutan

13. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Renstra 2025-2029 1. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2. Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun 3. Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM 5. Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 6. Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

A.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Analisis Efisiensi

A. Analisis Efisiensi

Tabel 3. 113
Analisis Efisiensi

No	Komponen	Analisa
1	Efisiensi Anggaran	1. Anggaran sebagian besar diarahkan pada kegiatan yang mendukung outcome utama untuk Renstra 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan”, “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan” dan “Meningkatnya Keselamatan Transportasi”, Renstra 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan” dan “Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau” dengan program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pelayaran. 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari total anggaran Rp. 129.336.991.187,- realisasi Rp. 123.179.151.059,- menunjukkan adanya hemat 5% yang berasal dari : - Sisa penggunaan perjalanan dinas - Hasil negosiasi dari Penyediaan Barang dan Jasa (Alat Tulis Kantor, Rapat, Penyediaan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Jasa Konsultasi, Pembangunan Zoss, Kertas dan Cover, Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi, Jasa Konsultansi Pengawasan dan lainnya. 3. Program Pelayaran dari total anggaran Rp. 3.558.167.500,- realisasi Rp. 3.248.301.564,- menunjukkan adanya hemat 9% yang berasal dari :

		a. Sisa penggunaan perjalanan dinas b. Hasil negosiasi dari Penyediaan Barang dan Jasa (Alat Tulis Kantor, Rapat, Prahua Karet, Life Jacket (Jaket Pelampung), Suvenir, sewa excavator, konsultasi pengawasan dan lainnya.
2	Efisiensi SDM	1. SDM untuk Pemaduan Moda dan Pengembangan jumlahnya cukup, tetapi kemampuan teknis dalam pengembangan transportasi darat masih belum memadai. Hal ini mempengaruhi efektivitas pengembangan transportasi darat. 2. Efisiensi SDM meningkat karena jabatan Sumber Daya Manusia Aparatur berjumlah 1 orang dimana dalam analisis kebutuhan pegawai berdasarkan ABK dibutuhkan sebanyak 3 orang pegawai. (produktivitas meningkat 60% dikarenakan : - Penggunaan media daring - Penggunaan aplikasi SIMPEG, E-MUTASI, SIPATUK dan lainnya.
3	Efisiensi waktu	1. Durasi waktu Pemeriksaan Surat Kelengkapan Pertanggungjawaban (SPJ) turun dari Rata-Rata 1 Jam menjadi 30 Menit (efisiensi waktu 50%), karena: - SDM yang berkompeten - Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana (komputer, printer, atk dan lainnya) - Sudah tersedianya format baku dan checklist kelengkapan sehingga mengurangi waktu revisi dan mempercepat proses verifikasi serta pencairan anggaran berikutnya 2. Durasi waktu surat menyurat seperti surat masuk dan keluar, disposisi dan pelaporan kegiatan turun

		dari rata-rata 1-2 hari menjadi 15 menit (efisiensi waktu 100%), karena : - Sudah tersedianya aplikasi Srikandi sehingga mengurangi waktu minta tanda tangan pimpinan, disposisi, nota dinas, surat keluar dan masuk serta pengiriman surat menyurat.
4	Capaian target vs realisasi	Rata-rata realisasi capaian kinerja dari sasaran strategis kepala dinas renstra 2021-2026 yaitu 104 % dan renstra 2025-2029 yaitu 96 % kurang dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan perhubungan berjalan efektif. Dikarenakan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menggunakan transportasi pribadi sehingga meningkatnya tingkat kemacetan di jalan, pembangunan jembatan dan jalan sehingga kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan perairan.
5	Dampak terhadap outcome	Keterjangkauannya dan konektivitas wilayah di daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah laut merupakan dampak dari outcome “Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan” ini menandakan efektivitasnya kinerja perhubungan.

B. Kesimpulan Efisiensi

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program perhubungan telah berjalan efisien namun belum sepenuhnya efektif. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran telah diarahkan pada program prioritas yang mendukung outcome Renstra, dengan penghematan anggaran sebesar 5% pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan 9% pada Program Pelayaran, yang berasal dari sisa perjalanan dinas dan optimalisasi melalui negosiasi pengadaan barang dan jasa. Efisiensi juga terlihat pada pemanfaatan SDM dan waktu kerja, ditandai dengan meningkatnya produktivitas SDM hingga 60% melalui penggunaan teknologi informasi serta percepatan

proses administrasi dan surat-menyurat yang signifikan berkat penerapan sistem digital. Namun demikian, dari sisi efektivitas, capaian kinerja sasaran strategis Renstra belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi teknis SDM di bidang transportasi darat serta faktor eksternal seperti meningkatnya penggunaan transportasi pribadi dan menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan perairan. Meskipun demikian, outcome berupa meningkatnya keterjangkauan dan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut telah tercapai, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja perhubungan memberikan dampak positif bagi konektivitas wilayah.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan: adalah :

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 161.368.758.666,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 149.065.839.370,- atau 92,38 %

Tabel 3. 114

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
DINAS PERHUBUNGAN		161.368.758.666	149.065.839.370	92,38
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	28.427.999.979	22.638.386.747	79,63
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	913.962.000	709.400.643	77,62
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	427.259.000	277.542.823	64,96
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.200.000	18.755.650	92,85

2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.200.000	18.738.500	92,76
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.000.000	26.391.150	94,25
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.774.000	21.030.650	92,34
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.500.000	42.952.782	94,40
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.143.000	181.080.588	90,48
2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	105.000.000	91.220.000	86,88
2.15.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	44.886.000	31.688.500	70,60
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.892.201.000	12.864.805.317	86,39
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.632.538.000	12.608.814.317	86,17
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.305.000	233.852.500	99,38
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.358.000	22.138.500	90,89
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	356.763.000	241.277.215	67,63

2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	172.720.000	97.700.000	56,57
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	184.043.000	143.577.215	78,01
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.869.000	167.757.728	79,93
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.400.000	65.490.000	95,75
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.469.000	102.267.728	72,29
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.365.282.900	2.635.327.856	60,37
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.804.500	37.401.072	96,38
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.696.000	58.732.765	58,91
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.661.545.400	1.337.936.193	50,27
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.675.000	74.561.765	67,98
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.800.000	15.600.000	60,47
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.378.418.000	1.062.472.830	77,08

2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.344.000	48.623.231	94,70
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.138.385.500	1.087.632.350	95,54
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	132.785.500	131.268.600	98,86
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.005.600.000	956.363.750	95,10
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.705.482.579	3.528.110.166	74,98
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.547.172.879	1.167.119.123	75,44
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.158.309.700	2.360.991.043	74,75
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.054.000	1.404.075.472	76,06
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.429.886.000	993.370.160	69,47
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	416.168.000	410.705.312	98,69

2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	129.336.991.187	123.179.151.059	95,24
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	62.497.000	57.251.226	91,61
2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	62.497.000	57.251.226	91,61
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	44.390.180.067	41.488.214.052	93,46
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	34.201.179.367	31.977.512.992	93,50
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.189.000.700	9.510.701.060	93,34
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.368.018.000	1.232.993.257	90,13
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	99.478.100	88.068.665	88,53
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	195.745.000	166.483.322	85,05

2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	863.310.000	819.811.670	94,96
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	209.484.900	158.629.600	75,72
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	85.911.600	74.199.352	86,37
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	70.103.200	59.457.240	84,81
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	15.808.400	14.742.112	93,25
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7.201.674.300	7.041.538.346	97,78
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	41.524.000	39.598.000	95,36
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.018.800	15.636.750	78,11

2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	5.393.000	3.232.000	59,93
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	7.129.740.000	6.979.847.996	97,90
2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4.998.500	3.223.600	64,49
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.564.962.820	72.729.185.657	96,25
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	18.476.900	17.264.874	93,44
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.546.485.920	72.711.920.783	96,25
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.602.000	18.451.250	94,13

2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	19.602.000	18.451.250	94,13
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	261.523.000	231.484.331	88,51
2.15.02.1.12.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Provinsi	210.000.000	190.240.250	90,59
2.15.02.1.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	51.523.000	41.244.081	80,05
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	130.319.600	74.444.188	57,12

	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.485.000	16.171.000	66,04
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	105.834.600	58.273.188	55,06
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.277.000	123.253.130	98,38
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai	125.277.000	123.253.130	98,38

	wilayah operasi kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	127.025.800	108.136.270	85,13
2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.548.200	65.605.160	94,33
2.15.02.1.15.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.280.000	16.960.500	72,85
2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	34.197.600	25.570.610	74,77

2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	3.558.167.500	3.248.301.564	91,29
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	77.804.300	74.175.884	95,34
2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	77.804.300	74.175.884	95,34
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	195.940.000	191.266.140	97,61

2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	195.940.000	191.266.140	97,61
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	60.678.800	58.896.050	97,06

2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.678.800	58.896.050	97,06
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.223.744.400	2.923.963.490	90,70
2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.981.680.400	2.682.599.330	89,97

2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	242.064.000	241.364.160	99,71
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	45.600.000	0	0,00
2.15.05.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	45.600.000	0	0,00
2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	45.600.000	0	0,00
JUMLAH		161.368.758.666	149.065.839.370	92,38

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 4.475.571.888,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 4.054.553.211,- atau 90,59%

Tabel 3. 115

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
UPTD TERMINAL TIPE B		4.475.571.888	4.054.553.211	90,59
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.137.987.888	2.765.273.907	88,12
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.270.000	69.864.000	98,03

2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.720.000	67.420.000	98,11
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	550.000	484.000	88,00
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	1.960.000	98,00
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.000.000	35.930.700	92,13
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000	35.930.700	92,13
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.373.500	264.316.404	91,66
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.182.900	47.036.250	95,64
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.870.600	44.398.150	89,03
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.625.000	34.285.000	96,24
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	2.205.000	45,94

2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.895.000	136.392.004	91,60
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.500.000	127.144.950	97,43
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.000.000	70.201.950	97,50
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.500.000	56.943.000	97,34
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.322.500	958.702.517	92,33
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	117.025.937	69,66
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.322.500	841.676.580	96,71
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.570.521.888	1.309.315.336	83,37
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.160.000	102.730.900	96,77
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.100.000	16.030.000	99,57

2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.448.261.888	1.190.554.436	82,21
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.337.584.000	1.289.279.304	96,39
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.337.584.000	1.289.279.304	96,39
2.15.02.1.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	1.337.584.000	1.289.279.304	96,39
JUMLAH		4.475.571.888	4.054.553.211	90,59

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 116
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah

Nama	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase Capaian
Dinas Perhubungan - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.740.000.000	7.406.947.862	270,33
UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	67.800.000	73.850.000	108,92
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	76.800.000	70.798.000	92,18
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.400.000	9.800.000	181,48

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Anggaran berdasarkan sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 117

Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program Prioritas			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Renstra 2021-2015 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	28.427.999.979	22.638.386.747	79,63
Renstra 2021-2026 - Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Perairan - Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan - Meningkatnya Keselamatan Transportasi Renstra 2025-2029 - Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan - Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	129.336.991.187	123.179.151.059	95,24
	Program Pengelolaan Pelayanan	3.558.167.500	3.248.301.564	91,29
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	45.600.000	0	0,00

Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 118

Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B

Sasaran Strategis	Program Prioritas			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Renstra 2021-2026 1. Peningkatan pelayanan bidang transportasi UPTD Terminal Tipe B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	3.137.987.888	2.765.273.907	88,12
2. Pelayanan jasa administrasi tata usaha kantor UPTD terminal tipe B Renstra 2025-2029 1. Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta 2. Meningkatnya pelayanan Terminal Penumpang Tipe B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.337.584.000	1.289.279.304	96,39

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 119

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

No	2024		2025	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Program Penyelenggaraan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Program Penyelenggaraan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
11		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
16	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
17	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
18		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah
20		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional

21	Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
22		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
23		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

		Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
24		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
25	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Total		Total	
	4	25	4	24
	Total Anggaran		Total Anggaran	
	244.157.956.754	194.511.197.560	161.368.758.666	149.065.839.370

Dari tabel diatas bisa dilihat ada penurunan kegiatan pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 yaitu kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan tersebut di tahun 2024.

Tabel 3. 120

Belanja Langsung Dinas Perhubungan

No.	2023		2024	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Pegawai	12.428.893.426	Belanja Pegawai	12.608.814.317
2	Belanja Barang dan Jasa	70.528.083.874	Belanja Barang dan Jasa	99.180.711.650
3	Belanja Modal	111.554.220.260	Belanja Modal	37.276.313.403
	Total	194.511.197.560	Total	149.065.839.370

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 pada UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 121

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 pada
UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan

No	2024		2025	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
Total			Total	
2		7	2	7
Total Anggaran			Total Anggaran	
3.766.000.000		3.696.000.000	4.475.571.888	4.054.553.211

Tabel 3. 122

Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B

No.	2024		2025	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500.000	Belanja Barang dan Jasa	3.707.309.800
2	Belanja Modal	183.500.000	Belanja Modal	347.243.411
	Total	3.696.000.000	Total	4.054.553.211

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut: Renstra 2021-2026 Dari 4 sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 didukung oleh 6 indikator, terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 2 indikator kinerja utama dengan kategori Baik. Renstra 2025-2029 Dari 3 sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 didukung oleh 8 indikator, terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 3 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, dan 1 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan. Pencapaian eselon di Dinas Perhubungan Renstra 2021-2026 memiliki 94 sasaran strategis tahun 2025 didukung oleh 119 indikator, terdapat 108 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 6 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, 3 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan, 1 indikator kinerja utama dengan kategori Kurang dan 1 indikator kinerja utama dengan kategori Sangat Kurang. Pencapaian eselon di Dinas Perhubungan Renstra 2025-2029 memiliki 94 sasaran strategis tahun 2025 didukung oleh 62 indikator, terdapat 50 indikator kinerja utama yaitu 110% dengan kategori istimewa, 9 indikator kinerja utama dengan kategori Baik, 1 indikator kinerja utama dengan kategori Butuh Perbaikan dan 2 indikator kinerja utama dengan kategori Sangat Kurang.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 161.368.758.666,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 149.065.839.370,- atau 92,38 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.302.919.296,- atau 7,62%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.475.571.888,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.054.553.211,- atau 90,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 421.018.677,- atau 9,41%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik yaitu :

1. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi

2. Memaksimalkan serapan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan monitoring internal terkait pelaksanaan kegiatan pada Satuan kerja Perangkat Daerah
4. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek perhubungan.
6. Meningkatkan rasio konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang merupakan rute kewenangan provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi serta mengupayakan Pembangunan terminal terpadu sebagai dukungan terkait penambahan nilai rasio konektivitas provinsi.
7. Meningkatkan On time performance layanan transportasi dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penyediaan jasa angkutan umum massal perkotaan.
8. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dengan terus mengupayakan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Meningkatkan Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan dalam proses pencapaian kinerja Satuan kerja perangkat daerah.
10. Meningkatkan Pemasangan Perlengkapan jalan di jalan provinsi

Demikian LAKIP ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor Perhubungan yang mengutamakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian. Semoga laporan LAKIP ini bermanfaat bagi upaya pengembangan di Bidang Transportasi dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk tahun mendatang upaya pencapaian kinerja yang lebih baik akan terus dilakukan, untuk itu kami akan melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada sektor perhubungan khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang efektifm efisien, nyaman, aman, tertib, bersih dan tepat waktu.
3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam pelayanan Publik untuk Bidang Perhubungan dan Terminal.
4. Meningkatkan keselamatan di jalan Provinsi dan sungai dengan pengadaan Fasilitas Keselamatan yang sesuai standar.
5. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lain diantaranya yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, terkait dengan rencana kerja antara Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Selatan.
 - b. Kementerian Perhubungan, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan dengan Provinsi dan Kota untuk menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Bersih Bebas Melayani/WBBM)
 - d. Biro Organisasi terkait pengembangan kelembagaan tata laksana dan akuntabilitas SKPD.
 - e. Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), berkaitan dengan perencanaan kinerja perhubungan yang termasuk dalam bidang Insfrastruktur Kewilayahan.
 - f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
 - g. Instasi vertical lainnya yang menjadi satuan kesatuan dalam mendorong dan mendukung terhadap kinerja perhubungan. Yang mana dalam perkembangan kedepannya memerlukan banyak Kerjasama lintas sektor.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. A. Yani Km. 30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru 70721
Laman <http://dishubprovkalsel.com>; Pos-el : dinasperhubungankalsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebelum dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu dilakukan reviu internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 3. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Evaluasi SAKIP
 4. Peraturan perundangan lain yang relevan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
 - B. Ketua :
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
 - C. Sekretaris :
Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan Dan Aset
 - D. Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan
2. Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasional Pelayaran
3. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang
4. Kepala Seksi Keselamatan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
5. Pengelola data kinerja
6. Operator aplikasi SAKIP / e-SAKIP

- KEDUA** : Tim Reviu memiliki tugas:
- a. Melakukan reviu terhadap kesesuaian indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja
 - b. Memastikan kesesuaian target, realisasi, dan sumber data kinerja
 - c. Melakukan penilaian kualitas analisis capaian kinerja
 - d. Memastikan keterkaitan program dan kegiatan terhadap sasaran strategis
 - e. Melakukan pemeriksaan konsistensi data kinerja dan anggaran
 - f. Memastikan laporan kinerja mencakup seluruh unit kerja termasuk UPTD/UPPD
 - g. Menyusun rekomendasi perbaikan laporan kinerja
- KETIGA** : Tim melaksanakan reviu sebelum Laporan Kinerja disampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Maret 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**


M. FITRI HERNADI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. A. Yani Km. 30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru 70721
Laman <http://dishubprovkalsel.com>; Pos-el : dinasperhubungankalsel@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN REVIU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fitri Hernadi, A.P.,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Menyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 telah dilakukan reviu internal oleh Tim Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

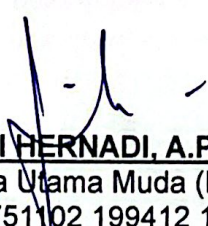
Reviu dilakukan untuk memastikan:

1. Kesesuaian indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja;
2. Kesesuaian antara target dan realisasi kinerja;
3. Kualitas analisis capaian kinerja;
4. Keterkaitan sasaran, program, dan kegiatan;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Cakupan pelaporan kinerja seluruh unit kerja termasuk UPTD/UPPD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 13 Maret 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


M. FITRI HERNADI, A.P.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751102 199412 1 001

KERTAS KERJA TIM REVIU INTERNAL LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA

NO	KOMPONEN	CHECK LIST	KETERANGAN
1	Konsistensi Dokumen		
	Sasaran sesuai Renstra	√	Sasaran sesuai dengan Renstra tahun 2021- 2026 dan tahun 2025-2029
	Indikator sama dengan Perjanjian Kinerja	√	Indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Struktural
	Target konsisten dengan dokumen perencanaan	√	Target Kinerja sesuai dengan Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja
2	Pengukuran Kinerja		
	Realisasi indikator jelas sumber datanya	√	Realisasi kinerja sesuai dengan laporan kinerja yang dikumpulkan setiap bulannya dan dasar perhitungan dari dokumen IKU yang sudah di sepakati
	Metode penghitungan indikator jelas	√	Perhitungan indikator kinerja sesuai dengan dokumen rumus IKU yang sudah di sepakati
	Persentase capaian dihitung dengan benar	√	Capaian sesuai dengan dokumen rumus IKU yang sudah di sepakati
3	Analisis Kinerja		
	Analisis tidak hanya menampilkan angka	√	Pada laporan kinerja tahun 2025 terdapat analisis peningkatan dan penurunan kinerja berupa upaya-upaya yang telah dilakukan, hambatan dalam pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjutnya.
	Analisis menjelaskan penyebab capaian	√	Pada laporan kinerja tahun 2025 terdapat analisis peningkatan dan penurunan kinerja berupa upaya-upaya yang telah dilakukan, hambatan dalam pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjutnya.
	Analisis menjelaskan kendala	√	Analisis yang disajikan telah memuat penjelasan mengenai berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
	Analisis memberikan solusi/perbaikan	√	Analisis yang memuat upaya perbaikan/tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya
4	Efisiensi		

	Ada analisis penggunaan sumber daya	√	Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan kinerja, penggunaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, waktu, capaian target dan realisasi dan dampak terhadap outcome telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja perangkat daerah.
	Ada hubungan antara biaya dan capaian	√	Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan kinerja, terdapat hubungan antara penggunaan biaya (anggaran) dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Realisasi anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan telah digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
5	Kelengkapan Laporan		
	Semua sasaran strategis dianalisis	√	Sasaran strategis yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja telah dianalisis peningkatan dan penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dan analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya capaian kinerja pada laporan kinerja tahun 2025
	Program/kegiatan mendukung sasaran	√	Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Setiap sasaran telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.
	UPT/UPPD dicantumkan dalam analisis	√	UPTD Terminal Tipe dan Trans Perkotaan telah tercantum dan di analisis di laporan kinerja tahun 2025

B. LEMBAR HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Laporan : 2025

A. Kesesuaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

1. Indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja : Ya
2. Target indikator konsisten dengan dokumen perencanaan : Ya
3. Realisasi indikator didukung data : Ya

B. Kualitas Analisis Kinerja

1. Analisis capaian menjelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan : Ya
2. Analisis memuat faktor pendukung : Ya
3. Analisis memuat faktor penghambat : Ya
4. Analisis memuat strategi perbaikan : Ya

C. Analisis Efisiensi

1. Terdapat analisis penggunaan anggaran : Ya
2. Terdapat hubungan antara capaian dan penggunaan sumber daya : Ya

D. Cakupan Pelaporan

1. Seluruh sasaran strategis dilaporkan : Ya
2. Kinerja unit kerja termasuk UPTD/UPPD dicantumkan : Ya

Kesimpulan Reviu:

Berdasarkan hasil reviu terhadap Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mengacu pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja yang digunakan telah konsisten dengan dokumen perencanaan, serta realisasi capaian kinerja didukung oleh data yang akurat dan tepat.

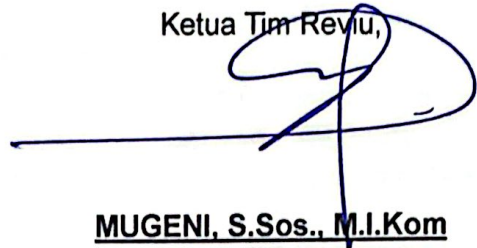
Dari aspek kualitas analisis kinerja, laporan telah memuat penjelasan mengenai capaian kinerja, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi atau langkah perbaikan yang direncanakan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan juga telah menyajikan analisis penggunaan anggaran serta keterkaitannya dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Seluruh sasaran strategis perangkat daerah telah dilaporkan dalam dokumen laporan kinerja dan cakupan pelaporan juga telah mencakup kinerja unit kerja termasuk UPTD/UPPD. Dengan demikian, secara umum Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 telah memenuhi unsur kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas penyajian laporan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.

Rekomendasi:

Perlu terus meningkatkan kualitas analisis kinerja agar pengawasan terus dapat berjalan dan berkesinambungan dalam Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penyusunan laporan kinerja sehingga informasi yang disajikan lebih komprehensif, terintegrasi dan dapat di pertanggung jawabkan.

Ketua Tim Reviu,



MUGENI, S.Sos., M.I.Kom

Penata TK. I (IV/b)

NIP. 1972205122 006041 005

C. MATRIKS TEMUAN DAN PERBAIKAN LAPORAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Laporan : 2025

NO.	BAGIAN LAPORAN	TEMUAN	REKOMENDASI PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
1	Analisa program/ kegiatan/ sub kegiatan	Terdapatnya sub kegiatan yang dalam perencanaannya kurang maksimal dalam perhitungan kebutuhan barang	Perlu dilakukan analisa kebutuhan barang khususnya bejana modal (mebeler)	Akan disusun analisa kebutuhan barang yg bersumber dari kebutuhan masing-masing bidang
2	Capaian indikator kinerja	Kurang maksimalnya upaya dalam meningkatkan capaian indikator kinerja yg berhubungan dengan pelayanan publik disebabkan oleh keterbatasan anggaran	Mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja yang tidak terpaku pada penggunaan anggaran.	Menganalisa dan melakukan pengawasan serta meningkatkan kegiatan yg mendukung pelayanan publik tanpa keterlibatan kebutuhan anggaran. Seperti survei internal dan koordinasi internal
3	Indikator kinerja	Kurang maksimalnya data dalam pemenuhan capaian indikator kinerja kepala dinas	Mengupayakan adanya data yang bervariasi sehingga dapat memberikan nilai capaian yg baik dan relevan untuk indikator kinerja kepala dinas	Akan melaksanakan koordinasi ke produsen data dan memastikan ketersediaan data yg lebih baik

Catatan: Matriks ini digunakan oleh Tim Reviu untuk mencatat temuan pada laporan kinerja serta memonitor tindak lanjut perbaikannya sebelum laporan disampaikan kepada APIP.